



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RAPAT KERJA KOMISI VI DPRRI DENGAN MENTERI BUMNRI DAN
MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPMRI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I (satu)
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Waktu : 10.38 s.d. ... WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara I Lt.1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P, Wakil Ketua Komisi VI DPRRI
Acara : Pembahasan mengenai:
1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN T.A 2020;
2. Progress Realisasi Anggaran T.A. 2021;
3. Pembahasan RKA K/L T.A. 2022.
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
Hadir : A. Anggota DPRRI:
52 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
12 dari 12 orang Anggota
1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulistio
3. Muhammad Prakosa
4. Darmadi Durianto
5. Rieke Diah Pitaloka
6. S.T Ananta Wahana, S.H.
7. Sonny T. Danaparamita
8. I Nyoman Parta, S.H.
9. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
11. Sondang Tiar Debora Tampubolon
12. dr. H. Mufti A. Anam
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
2. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
3. Doni Akbar, S.E.

4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H, M.M.
5. Nusron Wahid
6. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
7. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
6 dari 7 orang Anggota
 1. Andre Rosiade
 2. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
 3. Khilmi
 4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
 5. M. Husein Fadlulloh, S.Bus., M.M. M.B.A.
 6. M. Hendrik Lewerissa, S.H., L.L.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Martin Manurung, S.E., M.A.
 2. Drs. H. Nyat Kadir
 3. H. Subardi, S.H., M.H.
 4. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
 5. Muhammad Rapsel Ali
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
6 dari 6 orang Anggota
 1. Faizol Riza, S.S.
 2. Ir. H. M. Nasim Khan
 3. Tommy Kurniawan
 4. Marwan Ja'far
 5. Drs. Muhammad Toha, S.Sos., M.Si.
 6. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
5 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
 2. Muhammad Dhevy Bijak
 3. Hj. Melani Leimena Suharli
 4. Putu Supadma Rudana
 5. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
4 dari 4 orang Anggota
 1. Amin AK., M.M.
 2. Hj. Nevi Zuairina
 3. Rafli
 4. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

5 dari 5 orang Anggota

1. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A.
2. Abdul Hakim Bafagih
3. Eko Hendro Purnomo, M.Si.
4. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.
5. Hj. Intan Fauzi, S.H., L.L.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
2. Elly Rachmat Yasin

JALANNYA RAPAT,

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-GP):

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,***

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI,
Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri
Investasi/ Kepala BKPMRI, Bapak Bahliil Lahadalia beserta jajarannya.**

Puja-puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPMRI pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Dalam rangka penyebaran pandemi Covid-19 maka rapat-rapat dilakukan oleh alat kelengkapan dewan dan mitra kerja pemerintah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kehadiran fisik pada rapat-rapat komisi dan badan paling banyak 20% dari jumlah anggota komisi atau badan dengan memperhatikan lampiran surat Ketua DPRRI Nomor : PW/10736/DPRRI/IX/ 2020 tanggal 11 September 2020 tentang Tata Cara Rapat Komisi/Badan pada Masa Tatanan Normal Baru;
2. Kehadiran fisik mitra kerja pada rapat-rapat DPRRI dengan ketentuan paling banyak 20% dari kapasitas tempat duduk pada ruang rapat komisi/badan dengan tetap memperhatikan lampiran surat Ketua DPRRI Nomor: PW/10736/DPRRI/IX/

2020 tanggal 11 September 2020 tentang Tata Cara Rapat Komisi/Badan pada Masa Tatanan Normal Baru;

3. Tata cara rapat di Komisi VI DPRRI dilaksanakan secara fisik dan *virtual*;
4. Peliputan pelaksanaan rapat Komisi VI DPRRI dilakukan *live streaming* oleh TV Parlemen, media cetak, dan media elektronik lainnya mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen;
5. Berdasarkan Pasal 249 Ayat (1) Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi setiap anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat dikarenakan kondisi tidak kondusif maka daftar hadir dapat dilakukan secara elektronik kehadiran anggota tercatat dalam list partisipasi aplikasi *zoom*;
6. Pada saat dalam berlangsung diharapkan anggota dapat menjaga ketenangan karena *detail* suara akan terdengar oleh seluruh peserta rapat dan akan berpotensi mengganggu jalannya rapat;
7. Para peserta rapat apabila tidak atau belum diberi kesempatan oleh pimpinan untuk berbicara maka diharapkan peserta rapat dapat mematikan secara suara *microphone* atau *mute*;
8. Rapat fisik dan virtual dilaksanakan dengan durasi maksimum 2 jam dan dapat diperpanjang maksimal 30 menit. Wah ini bisa kurang ini Pak, teriakan Pak Hekal katanya;
9. Materi rapat wajib disampaikan oleh kementerian dan lembaga terkait 5 jam sebelum rapat dimulai;
10. Materi Rapat di-*share* ke Anggota Komisi WA grup 2 jam sebelum rapat dimulai dan ditayangkan melalui aplikasi Zoom;
11. Setiap anggota berhak mengikuti rapat fisik dan visual dan untuk menyampaikan pertanyaan tanggapan melalui juru bicara dari setiap anggota fraksinya;
12. Interupsi ditiadakan selama rapat virtual;
13. Alur rapat sebagai berikut :
 - pembukaan,
 - presentasi singkat oleh kementerian dan lembaga,
 - pertanyaan jubir,
 - tanggapan kementerian dan lembaga,
 - tanggapan balik jubir,
 - tanggapan akhir kementerian dan lembaga,
 - kesimpulan, dan
 - penutup.
14. Presentasi awal kementerian dan lembaga diberikan waktu atau lembaga diberikan waktu 10 menit, tanggapan pertama 10 menit dan tanggapan akhir 10 menit;
15. Juru bicara fraksi diberikan waktu menyampaikan pertanyaan selama 5 menit dan tanggapan balik selama 3 menit;
16. Lalul intas rapat diatur oleh admin yang membantu pimpinan rapat terutama dalam menghidupkan dan mematikan *microphone* masing-masing peserta;

17. Pada saat sesi tanya jawab dan sesi kesimpulan pimpinan hanya memberikan hak bicara kepada perwakilan dari masing-masing fraksi.

Bapak, Ibu yang kami muliakan,

Laporan Sekretariat kami Komisi VI DPRRI, rapat kerja hari ini dihadiri dan ditandatangani oleh 31 orang dari 54 Anggota Komisi VI DPRRI yang terdiri atas 9 fraksi. Dengan demikian forum telah terpenuhi sebagai tentukan dalam Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Oleh karena itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah saya membuka rapat pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum, setuju?

**(RAPAT:SETUJU)
(RAPAT DIBUKA 10.38 WIB)**

Terima kasih kami ucapkan kepada Kementrian Investasi/Kepala BKPM, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini. Sesuai dengan yang telah kami sampaikan, agenda rapat kerja hari ini adalah mengenai pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP APBN Tahun Anggaran 2020. Dua, *progress* realisasi anggaran tahun anggaran 2021 dan pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2020.

Dapat disetujui ya agendanya ya? Setuju ya agendanya dan lain-lainnya nanti aja setelah agenda selesai gitu kan, Pak ya?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak, Ibu dan hadirin yang kami muliakan,

Sebagaimana kita ketahui pemerintah telah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPRRI telah menyetujui untuk dilaksanakan pembahasan terhadap RUU tersebut. Selain itu, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020.

Sesuai tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran sebagai diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf H dan Peraturan DPRRI tentang Tata Tertib tahun 2020 apabila mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN serta membahas dan menindaklanjuti hasil BPK pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi.

Selanjutnya Pasal 173 Ayat (5) menyebutkan bahwa Badan Anggaran melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan pandangan umum fraksi, tanggapan pemerintah serta saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan Rapat Kerja Komisi dengan pemerintah serta laporan keuangan pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, Rapat Kerja Komisi VI DPRRI pada hari ini dilaksanakan sesuai surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/0936/ DPRRI/VII/ 2021 tanggal 13 Juli 2021, perihal

Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, kami persilakan Bapak Menteri Investasi/Kepala BKPMRI untuk menyampaikan penjelasan mengenai pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2020, *progress* realisasi anggaran tahun anggaran 2021 dan pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2022. Pak Menteri kita persetujuan dulu nih sampai jam 12 ya?

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri, semakin cepat semakin bagus.

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Setuju, Pimpinan.
Kita karena Covid ini lebih cepat lebih baik.

KETUA RAPAT :

Dan saya lihat anggaranya juga nggak nggak naik jadi agak sulit untuk membahasnya, terlalu panjang. Kalau naik mungkin kita akan bahas berkepanjang-panjang di sini.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Yang saya hormati Pimpinan dan Pimpinan Komisi VI DPRRI dan seluruh Bapak-Ibu Anggota DPR Komisi VI DPRRI, Hadirin yang saya muliakan,

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Syalom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,**

Pertama, Pimpinan karena kita tidak terlalu panjang, izin kan saya untuk tidak banyak lagi untuk membuat kata-kata puisi tapi saya langsung masuk pada substansi materi yang sesuai dengan agenda rapat kita pada hari ini yaitu mencakup 3 hal adalah menyampaikan tentang realisasi Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan progres kerja dari Kementerian Investasi, kemudian laporan 2021 dan kemudian adalah rencana RKL kita untuk 2022.

Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Realisasi anggaran tahun 2022 waktu itu masih BKPM itu realisasi sebesar 97,65% dan pagu anggaran kita pada saat itu sebesar Rp524.406.706.000,-. Adapun yang tidak terealisasi sebesar Rp12.325.650.341,- atau sebesar 2,35%. Dalam kurun waktu tahun 2020 target-target yang dicanangkan lewat Bappenas ataupun arahan Bapak Presiden kepada kami yaitu berupa pertama adalah realisasi investasi di tahun 2020 target sebesar 817,2 triliun. Alhamdulillah, atas kerja bersama dan dukungan dari Pimpinan Komisi VI dan seluruh Anggota DPR Komisi VI mampu kita realisasikan sebesar 826,3 triliun dimana sektor sekunder sebesar 27,2 triliun targetnya adalah realisasinya 272.

Kemudian sebaran investasi antara Jawa dan luar Jawa yang menjadi titik penting memberikan penyebaran pertumbuhan ekonomi, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru yaitu untuk luar Jawa sebesar 50,5%, targetnya 48,3% dan realisasinya 50,5%. Kemudian kontribusi penemuan modal PMDN kita itu dari target 48,8 realisasinya 50,1%. Jadi, Pimpinan di tahun 2020 realisasi penyebaran investasi antara Jawa dan luar Jawa, luar Jawa yang lebih besar kemudian *foreign* dari *investment* kita dengan dibandingkan dengan PMDN, PMDN kita punya lebih baik karena memang di 2020 itu hampir semua negara mengalami satu musibah dunia tentang Covid-19 dan karena itu dilakukan suatu penyesuaian sehingga pada tahun tersebut PMDN kita jauh lebih baik.

Kami juga juga melaporkan Pimpinan bahwa Bank Dunia pada tahun 2020 tidak mengumumkan tentang tingkat ranking kemudahan berusaha. Jadi, di Indonesia masih tetap di urutan 73. Jadi, sejak kami masuk di BKPM yang sekarang menjadi Kementerian Investasi belum ada pengumuman dari *World Bank* sehingga ini menjadi PR. Kami baru balik dari sana kemarin ke *World Bank*. Kami menghadap *World Bank* dan kami sudah menanyakan hal itu dan In Syaa Allah bulan Oktober ini ada rencana pengumuman.

Yang kedua nilai reformasi birokrasi kami di.

KETUA RAPAT:

Informatif sedikit nih. Ada rencana penurunan nggak ada dari 73 itu dari hasil lobby-lobby?

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

In Syaa Allah, kita targetkan di sekitar 60 Pimpinan, karena Pak Presiden memberikan kami waktu 3 tahun Pimpinan sampai dengan tahun 2023 itu harus 40. Memang ini pekerjaan enggak gampang-gampang Pimpinan 40, 50.

KETUA RAPAT:

Artinya OSS bisa berjalan dengan dengan baik.

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

In Syaa Allah, In Syaa Allah.

KETUA RAPAT:

Terima kasih

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Ini tergantung lobby-lobby, Pimpinan. Lobby-lobby setengah *chamber* yang di dalam undang-undang. Alhamdulillah, Pimpinan kami di Kementerian Investasi yang dinilai oleh Reformasi Birokrasi kami nilainya dari target 77 atau BB menjadi 77,66. Jadi, alhamdulillah ya agak-agak patenlah dengan penilaian BPK, WTP.

Pimpinan, Bapak, Ibu Dewan yang kami hormati,

Adapun keuangan tahun 2021 telah itu totalnya sebesar setelah disahkan oleh DPR waktu itu kurang lebih sekitar 1 triliun lebih, *refocusing-refocusing* Pimpinan terakhir tinggal 834.778.720.000,- sekarang sudah terealisasi 44,86%, yang sisa 55,14%. In Syaa Allah, kami akan kejar dengan target realisasi keuangan kami nanti di akhir bulan Desember sebesar minimal sama dengan tahun kemarin yaitu 97% karena memang uangnya juga sedikit Pimpinan jadi pasti akan habis.

Adapun program kami untuk tahun 2022 Pimpinan, sebelum saya masuk ke RKL Pimpinan, izin kami melaporkan Pimpinan. Sekedar informasi bahwa realisasi investasi kami sekarang sampai dengan kuartal kedua atau sama dengan semester satu itu dari target 900 triliun sudah realisasi sebesar 442,7 triliun. Dari 442,7 triliun tersebut *foreign investment* kita sebesar 51,6%. Jadi, izin kami laporkan Pimpinan bahwa sesungguhnya sekalipun masih pandemi Covid-19 kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam menanamkan investasinya itu sudah jauh lebih baik dan ini di tandai dengan kuartal kedua atau digabungkan menjadi satu semester itu sudah mencapai 51,6%.

Dibandingkan dengan posisi jadwal yang sama di tahun 2020, kita itu di bawah 50%. Kemudian PMDN kita sebesar 214,2 triliun. Yang menarik adalah tetap pimpinan realisasi investasi di luar Pulau Jawa itu semakin membuat para investor baik dari dalam maupun negeri itu semakin tertarik Pimpinan, kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri dari pemerintah ke pemerintah sampai sekarang itu pembangunan infrastruktur kita di luar Pulau Jawa semakin membaik, Pimpinan. Yang kedua, kami mempunyai strategi untuk memberikan insentif lebih kepada perusahaan-perusahaan yang membangun hilirisasi, membangun industri di luar Pulau Jawa sebagai bagian dari kehadiran pemerintah untuk bagaimana bisa meningkatkan IRR mereka yang pada akhirnya *break even point* bisa cepat tercapai.

Kemudian tenaga kerja Pimpinan sebesar 623.715. Nah ada 2 (dua) Pimpinan yang menarik. Sejak tahun 2020 akhir, Eropa itu masuk dalam 5 besar dari negara-negara yang menanamkan modalnya di Indonesia yaitu dulunya Belanda. Di kuartal pertama itu Swiss. Swiss masuk menjadi dalam sejarah mungkin peradaban kita pasca reformasi, Swiss masuk 5 besar dan sekarang Belanda itu masuk 4 besar mengalahkan Korea Selatan dan mengalahkan Jepang. Ya, nanti kita, nanti kita ini kita kasih beberapa makan minuman Industri Farmasi.

Jadi, kan kita dorong sekarang itu kan alat kesehatan juga. Jadi, makan minuman Farmasi itu sebagai bagian yang harus kita dahulukan, nanti kami akan serahkan *breakdown*-nya. Kemudian Belanda. Belanda di kuartal kedua itu mampu mengalahkan Korea Selatan dan Jepang. Jadi, ini suatu fenomena baru, Pimpinan bahwa memang perubahan Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah persepsi dunia terutama negara-negara di Eropa yang selama ini harus diakui bahwa mereka bukan merupakan bagian dari 5 besar investasi yang masuk ke Indonesia. Ini karena kerja keras dari Pimpinan Komisi VI dan seluruh Anggota Komisi juga sampai bisa seperti ini.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kerja keras staf khusus kepala, Menteri Investasi.

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Kalau Pak Nusron kurang menanyakan sesuatu yang prinsip nggak keluar tentang bagaimana strategi mendatangkan dari Eropa tapi karena Pak Nusron rajin untuk mengkritisi ini mungkin juga sebagai alat pemacu bagi Pak Eka bisa melakukan tugas-tugasnya.
Pimpinan yang kami hormati,

Kami juga laporkan bahwa alhamdulillah, puji Tuhan, kami di Kementerian Investasi yang diberikan amanah oleh Undang-Undang Cipta Kerja pada PP Nomor 5 dan Nomor 6 sebagai penyelenggara dari perizinan yang berbasis *online* yaitu via OSS. Alhamdulillah tanggal 9 Agustus kemarin sudah di-*launching* Pimpinan. Dan dari proses *launching* tersebut sekarang sudah menghasilkan 76.778 NIB. Itu ada usaha mikronya Pimpinan paling besar usaha kecil mikro itu 96%, usaha kecil 2,6%, usaha menengah 0,49%, usaha besar 0,41% dan perwakilan 0,04. Artinya dengan data ini pimpinan bahwa betul jumlah unit usaha di Republik Indonesia ini 99% lebih itu ada pada UMKM. Jadi, UMKM ini penting menjadi bagian yang harus kita dorong betul untuk bagaimana untuk memudahkan mereka dalam melakukan investasi.

Pimpinan,

Sebelum ada pertanyaan dari Bapak, Ibu Anggota DPR, kami akui dalam proses penyelenggaraan OSS ini Pimpinan belum 100% sempurna baru kurang lebih sekitar 80 sampai 81% itu juga melaporkan ke Bapak Presiden. Karena dalam catatan pelajaran kami tidak ada aplikasi di dunia ini

yang begitu langsung dijalankan dan semua itu 100% *perfect*, itu selalu ada penyesuaian-penyesuaian. Dan untuk mengambil data migrasi, data yang sekian juta yang dilakukan sekian tahun untuk pada waktu bulan itu pimpinan butuh waktu.

Jadi, kami akui bahwa memang dalam implementasi OSS untuk sekarang belum 100% sempurna tetapi kita lagi penyesuaian-penyesuaian terus karena itu memang teori, fakta dalam sebuah transisi sistem selalu seperti itu.

Pimpinan yang kami hormati,

Masuk pada RKL. Anggaran kami di tahun 2022 berdasarkan pagu itu sebesar 711 miliar, Pimpinan. Coba ininya memang Pimpinan, kita salah-salah baca bahaya juga menyangkut angka, Pimpinan. Soalnya menyangkut angka nih persoalan sensitif karena itu kita harus baca Pimpinan

KETUA RAPAT:

Benar karena 513 itu lumayan banyak untuk sosialisasi teman-teman.

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Iya iya ini dalam rangka pemahaman masyarakat terhadap undang-undang Pimpinan karena undang-undang ini tidak akan bermakna Pak kalau tidak mampu kita sosialisasikan secara baik. Dan itu adalah bagian integral daripada tugas Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan ini bersama-sama kita. Dan saya pikir Pimpinan karena undang-undang ini terkait dengan kemudahan usaha dan karena di BKPM di Kementerian Investastasi tidak hanya bicara dalam tapi juga luar negeri. Jadi, ini sosialisasi baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka membangun kesepahaman untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara.

KETUA RAPAT:

Iya terutama untuk menurunkan nanti tingkat investasi yang apa namanya kesiapan investasi di Indonesia kan?

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Iya-iya.

Pimpinan yang kami hormati.

Setelah kami melihat, menelaah dan mempelajari secara seksama dari target apa yang disampaikan oleh pemerintah dan kondisi yang ada sekarang, anggaran kami di tahun 2021, 2021 itu Pimpinan dari 1 triliun turun menjadi 830 miliar, itu masih BKPM, Pimpinan. Sekarang udah jadi menteri anggarannya agak turun. Kami memahami sebesar Rp711.513.548.000,-. Karena itu, Pimpinan, kami mengajukan anggaran tambahan. Anggaran tambahan kami kurang lebih sekitar 600 miliar, Pimpinan menjadi 1,3.

Kenapa Pimpinan? Iya, kita memang orang jujur Pimpinan. Jadi, kita tidak mau pake ekor-ekor kalau hitungannya tapi kalau Pimpinan tambah ekor kita tambah Pimpinan. Kita kan bagian, forum ini adalah forum yang untuk mengakomodir aspirasi mitra kerja, Pimpinan.

Pimpinan yang kami hormati,

Kami butuh anggaran ini dalam rangka bagaimana mencapai target teralisasi investasi 1.200 triliun karena pertumbuhan ekonomi kita kedepan di atas 5%, Pimpinan. Itu apabila investasi kita di atas 1200 triliun untuk investasi langsung, kenapa? Kalau Pimpinan, kita baca pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia di kuartal kedua hasil BPS 7,07% itu salah satu kontribusi terbesarnya adalah investasi yang tumbuh hampir 8%. Jadi, ini kaitannya pertanyaan penelusuran dulu dan ini sudah terjawab bahwa itu benar adanya versi BPS.

Yang kedua Pimpinan, kalau kita juga melihat bahwa pertumbuhan konsumsi itu lebih banyak bisa sarankan karena terciptanya lapangan pekerjaan dari menengah ke bawah, Pimpinan : sektor pertanian dan UMKM dan kolaborasi investasi besar dan UMKM, Pimpinan. Ini bagian daripada penguatan.

Dan yang ketiga adalah untuk menerjemahkan gagasan besar bahwa Presiden di 10 di acara 100 ekonom, ada 3 (tiga) menjadi prioritas ketika kami menemui Presiden:

1. Hilirisasi sebagai bentuk wujud strategi dari implementasi tentang transformasi ekonomi yang ujungnya adalah nilai tambah,
2. Digitalisasi UMKM, dan
3. Ekonomi Hijau.

Ekonomi Hijau dalam rangka mewujudkan ke sana Pimpinan, kami dikasih target 1.200 triliun pada tahun 2022 dengan membangun hilirisasi energi baru terbarukan. Memang ini permintaan dunia dan kita tidak bisa mendiamkan diri untuk tidak menjemput bagian permintaan dunia yang menjadi kebutuhan dunia ke depan.

Yang ketiga, Pimpinan adalah kami juga bagaimana membuat kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional yang dari daerah, karena itu ke depan kita membuat perment. Undang-undangnya sudah ada Pasal 90 Cipta Kerja, arahan Bapak Presiden sudah jelas tinggal kami membuat perment-nya. Ini sudah mulai berjalan.

Adapun anggaran 600 miliar Pimpinan, di antaranya adalah kita akan mengeksekusi realisasi investasi bagi Perusahaan Prima Fasilitas Penanaman Modal sebesar 2.900 triliun.

Pimpinan,

Penting kami laporkan di forum yang sangat terhormat ini bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 pertengahan ketika insentif fiskal *tax holiday*,

tax allowance belum di Kementerian Investasi itu kementerian sebelumnya sudah mengeluarkan fasilitas sebanyak 2.900 trilliun. Namun, itu belum bisa tereksekusi karena berbagai macam kendala. Nah, kami fokus ini, Pimpinan.

Jadi, beberapa kali kami menjelaskan bahwa kami bermain seperti bermain bola, menyerang dan bertahan, menyerang, mencari yang baru, bertahan menyelesaikan yang sudah ada. Saya pikir Pimpinan karena waktu kita tidak terlalu lama Pimpinan dan teori kita lebih cepat lebih baik, hanya ini Pimpinan yang perlu kita laporkan pada kesempatan berbahagia ini. Kalau ada arahan, petunjuk dan pertanyaan dengan senang hati untuk kami laporkan. Sebelum ada pertanyaan dari Pak Nusron, Pimpinan, arahan-arahan nonteknis dari Pak Nusron sudah kami selesaikan secara seksama dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya. Jadi, saya harap kalau ada hal-hal yang belum tersurat tapi tersirat, saya pikir setengah *chamber* saja.

Demikian Pimpinan.
Terima kasih, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Dan salam sejahtera untuk kita semua

KETUA RAPAT:

Ya, hal-hal teknis, hal-hal yang lebih teknis sudah diselesaikan rupanya.

Terima kasih, Pak Menteri Investasi.

Selanjutnya tentu teman-teman, kita sangat prihatin dengan kondisi Kementerian Investasi ini karena begitu kekuasaan diberikan fasilitas dikurangi kan begitu. Ini menjadi keprihatinan kita pada Kementerian Investasi. Untungnya masih ada apa Pak Bahlil ini yang terbiasa dengan "OO" terbiasa karena dia di HIPMI akan dia pasti saya yakin dia bisa untuk lebih efisien efektif. Namun, kalau kita melihat target-targetnya tentu kita juga harus mendorong Kementerian Investasi ini mendapatkan fasilitas yang *equall* dengan target-target yang akan dicapai. Apalagi tadi kita akan mencoba melalui OSS ini nanti akan menurunkan kemudahan daripada apa trik ranking penurunan kemudahan berinvestasi di Indonesia termasuk dalam hal sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Ini sangat menarik sebenarnya untuk kita banyak sekali yang belum tahu tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Banyak sekali yang belum tahu bagaimana kemudahan mendaftar NIB aja mereka masih, masih belum mengerti. Apakah NIB ini sama dengan kenotariatan dan sebagainya? Itu masih-masih bingung mereka Pak Menteri. Ini, ini harus lebih masif lagi disuarakan di masyarakat ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini sehingga mampu kita mencetak pengusaha-pengusaha baru dan menaik-kelaskan pengusaha-pengusaha yang sudah ada.

Selanjutnya kalau bisa karena ini masa PPKM, teman-teman barangkali pertanyaannya lebih kepada singkat, jelas gitu, substansional tentunya sehingga nanti kita sama-sama terutama yang hadir di sini bisa sama-sama lebih cepat pulang tentunya lebih menjaga kesehatan kita.

Saya persilakan Bu Nevi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Saya pikir saya terakhir Pak.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Daftar Ketua, daftar Ketua.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar

F-PD (DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M. Sc.):

Daftar Ketua, Ibas, Fraksi Demokrat.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Evita daftar.
Hallo Mas Ibas.

F-PD (DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M. Sc.):

Hallo Bu Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Hallo, udah lama nggak ketemu.

KETUA RAPAT:

Bentar Mas Ibas, Ibu Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Saya duluan dari Mas Ibas deh tadi absennya.

KETUA RAPAT:

Oh, begitu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Iya

KETUA RAPAT:

Ini siapa nih?

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Saya duluan loh.

KETUA RAPAT:

Siapa nih

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Saya Evita.

KETUA RAPAT:

Bu Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Saya Evita, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tadi nyebut nama duluan Pak Ibas masalahnya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Eenggak, salah dong saya duluan baru Mas Ibas

KETUA RAPAT:

Terus

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Ok

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Mufti Anam, Ketua, Mufti Anam

KETUA RAPAT:

Mufti, terus cukup ya dari virtual ya.
Silakan Bu Nevi

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih.

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Nanti, Ananta ikut Ketua.

KETUA RAPAT:

Ok

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati, dan Para Menteri, Bapak Menteri bersama jajaran.

Kami dari F-PKS tentu apresiasi capaian target dan realisasi investasi tahun 2020 mencapai 826,3 triliun atau 101% dari target 817,2 triliun. Tapi mungkin kami ingin mendapatkan laporan dari Pak Menteri bagaimana serapan tenaga kerja Pak untuk meningkatnya investasi di Indonesia. Itu yang pertama.

Lalu terus yang kedua Pak Menteri yaitu apa fokus pemerintah dalam perencanaan APBN 2022 Pak Menteri bersama jajarannya terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Anggaran yang tadi disampaikan tentu Pak Menteri juga harus menjelaskan kepada kami apa fokus untuk pemulihan ekonomi nasional dari Kementerian Investasi.

Lalu Pak Menteri ini mungkin kaitan masalah-masalah yang ada di lapangan. Pernah juga ditanyakan bagaimana rencana pembangunan proyek khususnya penanaman modal dari Korea kasus Lotte di Cilegon yang masih ada dan hambatan per sekian hektar tanah. Ini sudah ini tidak hanya terjadi di Cilegon, mungkin di tempat-tempat lain juga terjadi, Pak Menteri. Tentu kita dari Kementerian Investasi sudah menjadi apa namanya jawaralah untuk mengurus investasi di Indonesia. Yang saya juga dengar juga Pak, itu ada satu Perusahaan Panas Bumi yang yang, yang, terkenal di dunia itu dari Perancis juga hengkang, Pak dari Indonesia gitu.

Ya, yang ada yang dia sudah masalah terus di Sumatera Selatan dan di Lampung dan sekarang sudah hengkang ya. Ini mungkin kita juga dari Kementerian Investasi juga harus memikirkan yang sudah mau investasi di Indonesia itu jangan sampai hengkang, Pak. Istilahnya kalau orang udah belanja di toko tuh ya dia sudah di toko dia harus keluar bawa belanjaan ya. Karena kita yakin memang di Indonesia ini dengan datangnya investasilah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pak.

Terus selanjutnya. Kan tadi Bapak udah sampaikan bahwa yang angka *easy of doing bussines* itu masih dalam peringkat 73 Pak, ya. Nah, tentu kami juga ingin mengetahui masalahnya apa Pak sehingga kita baru sampai ke target kita yang target Presiden sampai ke 40 ya.

Mungkin itu aja, Pak Menteri yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Nevi.

Pak Menteri sebelum ke pertanyaan lain, saya mau memperkenalkan dulu di sini ada anggota-anggota baru kita. Anggota baru kita di Komisi VI Pak Jon Erizal. Sebenarnya nggak perlu diperkenalkan karena Pak Menteri udah kenal waktu itu. Pak Jon Erizal baru, terus kemudian ada 4 (empat) sebenarnya Pak Menteri, ada Pak Bambang Heri Purnama, ada Bu Haeny Relawati itu dari Golkar, ini menggantikan Pak Mukhtarudin dan Pak Lamhot. Jadi, diganti oleh Bambang Heri Purnama dan Ibu Haeny Relawati. Kemudian Pak Jon Erizal dari PAN. Kemudian ada Bu Intan Fauzi dari PAN juga. Itu anggota-anggota baru kita di Komisi VI.

Selanjutnya silakan Pak Herman Khaeron.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Terima kasih.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Saudara Menteri beserta seluruh jajarannya,
Saya harus sebut staf khusus, Pak Eka Sastra, dan
Yang belum hadir di sini Pak Narto dan kawan-kawan.**

Terima kasih.

saya langsung ke persoalan. Pertama, memang saya merasakan dalam bulan-bulan terakhir ini justru lebih merasa kehilangan Kementerian Perindustrian daripada datangnya Kementerian Investasi, karena apa? Kalau melihat proyeksi anggaran memang tidak memungkinkan. Jadi, sangat lah aneh jika pada sisi lain, institusinya dinaikkan menjadi kelas kementerian tapi anggaranya justru turun dari kelas badan sebelumnya.

Saya juga sangat aneh karena Pak Bahlil kan dekat sekali dengan menteri gitu dengan presiden. Jadi, ya colek-colek dikitlah masalah anggaran ini karena targetnya sungguh prestisius harus mencapai 1.250 triliun. Target yang sangat berat. Mungkin kalau bukan Pak Bahlil sudah stress jadi Menteri Investasi itu. Situasinya seperti ini, banyak hambatan tetapi justru targetnya semakin naik. Saya paham bahwa dalam teori pertumbuhan, investasi menjadi salah satu instrumen selain daya beli kemudian net ekspor atas impor dan satu lagi adalah APBN, *government spending*.

Jadi, investasi menjadi instrumen penting dan inilah keakuratan Kementerian Investasi ini harus betul-betul baik dari sisi administratif, administratif itu orang daftar, teradministrasi dan implementasi karena pertumbuhan bukan berdasarkan catatan tetapi berdasarkan implementasi sehingga ini yang harus betul-betul tepat. Satu hal terkait dengan anggaran baik di tahun anggaran 2020 kemudian di anggaran 2021 maupun terhadap anggaran 2020. Saya meminta kita harus sama-sama bekerja keras agar anggarannya naik, satu.

Yang kedua, Pak Bahlil meski pintu Kementerian Investasi terbuka melalui sistem yang memudahkan, sistem yang tidak lagi banyak hambatan tetapi kalau pada sektor-sektor lainnya ini banyak hambatan juga menurut saya menjadi persoalan tersendiri di dalam persoalan investasi. Oleh karenanya, Kementerian Investasi harus ada rekomendasi yang mengikat.

Saya tidak tahu apakah harus dibuatkan perpres/peraturan presiden sehingga pada waktu menyetujui investasi di dalam negeri baik itu PMA maupun PMDN berikut dengan rekomendasinya itu yang mengikat gitu loh. Tidak boleh lagi kemudian misalkan persoalan tanah menjadi masalah apa yang disebabkan oleh Ibu Nevi. Tidak lagi kemudian bermasalah dengan persoalan izin sektoral meski hampir seluruh perizinan terkait informasi kan sudah ditarik di Kementerian Investasi. Semestinya kan berjalan ini gitu loh, enggak *stuck*.

Persoalan tanah, belum lagi nanti persoalan regulasi kementerian lain yang membatasi terhadap ekspansi investasi. Kemudian belum lagi barangkali dengan ego sektoral akan muncul di sana, belum lagi ada oknum-oknum yang bisa menghambat di sana. Nah, ini harus disertai oleh rekomendasi nggak bisa tidak sekarang. Maka itu kenapa tadi saya minta bahwa hasil kerja kerasnya Menteri Investasi pada periode sebelumnya maupun proyeksi pada masa yang akan datang, coba saya minta dalam bentuk detail matriks supaya tahu ini investasinya, ini investasinya di Cirebon misalkan gitu.

Di Cirebon dihambat Walikota, Walikotanya tak jever, saya ikut membantu gitu untuk Saudara Menteri. Nah, ini penting karena tanpa rekomendasi itu pasti akan ada hambatan dan sumbatan ego sektoral yang lain sehingga tetapi tidak bisa serta-merta menteri mengeluarkan sebuah rekomendasi enggak serta merta, ini harus ada perpres yang menguatkan sehingga mengikat, rekomendasi itu mengikat terhadap apa yang harus dicapai oleh kementerian lainnya.

Selanjutnya, saya juga menyoroti terkait Pak Bahlil. Ini nanti tertulis saja, saya tidak minta dijawab di sini tertulis langsung ke saya saja terkait dengan temuan BPK 2019/2020. BPK menemukan 75,94 triliun investasi asing bermasalah yang terdiri dari 4.103 investasi, *item* investasi. Saya tidak minta dijawab ya Pak Bahlil ya.

Kemudian ini mengacu kepada Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018. Saya juga meminta apa saja 8 (delapan) kelemahan sistem pengendalian intern yang ini juga menjadi temuan BPK. Juga 4 (empat) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini ada 4 (empat) kasus atau 4 (empat) temuan yang juga tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Kemudian ada nilai realisasi penanaman modal dalam laporan BKPM tahun 2019 tidak menunjukkan sebenarnya iya tidak menunjukkan sebenarnya yang 15,22 triliun itu dan dianggap sebagai manipulatif. Kemudian laporan BPK juga menunjukkan tidak sesuainya RKP 2019 senilai 850 triliun terhadap target investasi, yang disebutkan di dalam laporan BPK 792 triliun. Nah, inilah yang saya katakan tadi di awal bahwa keakuratan Kementerian Investasi di dalam menempatkan angka, data ini penting karena sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan.

Kalau kemudian ini hanya administratif dan kemudian realisasi tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan sangat bahaya ini akan terakumulasi menjadi persoalan pada waktu nanti di akhir laporan pertanggung jawaban presiden. Ini akan terakumulasi karena sekali lagi investasi adalah bagian dari instrumen pertumbuhan nasional.

Terkait dengan anggaran tadi mohon ya detail investasinya ya. Jadi, saya kalau melihat data grafik, rasanya ini saya mau lihat apa sih gimana gitu investasi itu. Terkait dengan usulan anggaran menurut saya kalau melihat beban dan perlunya akselerasi peningkatan pemahaman terhadap target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah masih kurang kalau 600 miliar tambahan. Tidak ideal bagi sebuah kementerian, tidak ideal, sekalai lagi Ini catatan Pimpinan, tidak ideal bagi kementerian yang punya target begitu besar untuk menarik investasi itu beda dengan para pengguna, begitu masuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian. Kementerian itu mereka pengguna, target itu bisa dicapai dengan berbagai cara.

Tapi, kalau investasi ini kan harus menarik, menarik minat harus menarik minat. Kalau tidak cantik orang tidak datang kalau bagus ya orang tidak mau beli gitu kalau tidak *profitable* orang tidak mau investasi gitu dan tidak mudah. Kata Bu Nevi harus mempertahankan sustainabilitasnya. Nah, ini penting. Sekali cacat mundur mereka.

Oleh karena itu, idealnya menurut saya coba di-*breakdown* kembali apalagi dengan 17 (tujuh belas) kementerian kalau nggak salah, 17 (tujuh belas) kementerian yang menerbitkan izin sekarang kan ditarik di kementerian 18 (delapan belas) kurang 1 (satu). 8 (delapan belas) kementerian izinya ditarik di Kementerian Investasi sangat tidak ideal dengan anggaran yang 834 triliun untuk tahun 2021 atau 711 triliun turun lagi iya 2002-nya turun, iya ujungnya milliar gitu maksudnya.

Nah, maksud saya ini menjadi kesimpulan, tolong disimpulkan secara keras. Dan bahkan saya meminta Pimpinan untuk menjadwalkan dengan Dirjen Perbendaharaan Negara dan Dirjen Anggaran, rapat di sini khusus

membahas mengenai kebutuhan anggaran Kementerian Investasi. Maka itu kenapa tadi saya katakan, loh anggarannya dong dibuat yang sekira kira idealnya seperti apa. Kalau idealnya seperti apa penyesuaian terhadap kondisi saat ini yang negara ini memang sedang kesulitan anggaran, situasinya tidak memungkinkan berapa turunnya dari idealnya. Nah, kalau turunnya dari idealnya sudah kelihatan. Nah, baru itulah nilai rasionalitas untuk Kementerian Investasi.

Kalau tadi kan nilainya mungkin dianggap ideal 800 ditambah 600 jadi 1,4 triliun. Mungkin dia dianggap ideal, padahal ini bukan hitungan-hitungan dia dengan menarik berbagai perizinan. Karena juga apa Pak Bahlil juga menghitung-hitung saya yakin butuh dukungan dari Aparatur Sipil Negara-nya nambah disitu keahlian yang harus nambah, harus ada bedol desa, dari Kementerian Kehutanan siapa yang ahli tempatkan di situ, siapa dari Kementrian Koperasi di situ tempatnya yang betul-betul mereka memahami perizinan dan menunjang terhadap daya tarik investasi. Belum lagi harus membuat perwakilan-perwakilan di luar negeri.

Yang terakhir sekali kami siap untuk mensosialisasikan di dalam negeri maupun di luar Negeri gitu aja karena selama ini kelihatannya Kementerian Investasi kurang sosialisasi dan kami bantu oleh Anggota Komisi VI .

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi, dibantu ya Pak Menteri. Semua siap membantu. Sebelah sini saya denger siap membantu katanya.

Selanjutnya Pak Jon Erizal.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,
Adinda Menteri, apa kabar saya minta pindah nih disuruh dukung
katanya sosialisasi biar cepat masuk investasinya,**

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya langsung masuk ke usulan anggaran dan ini saya kaitkan dengan kualitas investasi yang masuk. Jadi, alhamdulillah, kita lihat target yang diberikan kepada Pak Menteri kan bisa dicapai luar biasa. Tentu kita

mengapresiasi. Kalau kita bicara mungkin nanti ke depan 2022 ini kan Pimpinan masih bisa direvisi kali ya usulan itu termasuk kualitas investasinya. Jadi, kalau kita bisa tercapai saya berasumsi dulu karena datanya belum kita lihat bisa tercapai dengan jual obral kan bisa juga tercapai penjualannya, investasi masuk bisa tercapai.

Kenapa saya *concern* soal ini? Saya ingat waktu saya ingat betul itu saya baca Kompas *statement*-nya Pak Budiono pada saat beliau Wakil Presiden. Beliau menyampaikan investasi yang masuk ke Indonesia itu *weak*, lemah kita hanya dapat tenaga kasar. Namun, satu sisi kita dapat pajaklah katakan tapi itu juga sering terjadi *transfer pricing* sehingga di bukunya di Indonesia itu selalu walaupun ada margin atau profit itu kecil, sisanya digeser ke negara-negara yang *tax haven* sehingga mereka dapat keuntungan yang lebih besar. Produksi yang ada di dalam negeri dibikin *work in process*, jadi barang setengah jadi, *finishing*-nya di negara-negara yang *tax haven*.

Nah, ini ini salah satu menjadi *concern* saya, karena apa? Kalau kita hanya dapat tenaga kerja saja jadi hitungan misalnya Pak Menteri menyampaikan oke dengan sekian investasi yang masuk dapat tenaga kerja sekian. Tenaga kerja itu perlu memang supaya masyarakat kita bisa bekerja tapi kualitasnya itu kalau masih di bawah standar. Nah, ini yang kita pertanyakan. Oleh karena itu, Pak Menteri, saya sepakat dengan Pak Herman tadi tolong bikin rencana-rencana kerja yang betul-betul menohok dengan kualitas yang bagus.

Artinya kalau kita lihat yang yang mengacu kepada sumber-sumber penerimaan kan di negara ini, ada penerimaan, ada pengeluaran makanya kita sebut APBN, anggaran penerimaan dan belanja negara. Kenapa namanya APBN? Kenapa penerimaan duluan? Kenapa bukan belanja duluan? Tapi dalam penyusunan anggaran, belanjanya selalu duluan baru penerimaan, selalu seperti itu. Nah, yang mengurus soal penerimaan itu salah satunya BKPM. Nah, kemudian tentu pajak dan lain-lain di bawah Menteri Keuangan.

Nah, yang harus kita tata betul. Saya juga kaget karena hari ini baru di sini kok anggarani kecil sekali pantas selama ini BKPM itu perannya tidak maksimal gitu loh. Nah, saya mengusulkan Pimpinan ini coba kita bikin FGD atau apa pun forum diskusi kita lebih detail sehingga kita betul-betul bisa mencapai target investasi yang memang punya kualitas.

Kita lihat semua orang mau masuk ke Cina misalnya itu harus bekerja sama dengan BUMN-nya misalnya. Nah, sementara saya menangkap satu cerita yang menarik juga. Saya kebetulan Dapil Riau, mungkin Pak Menteri masih ingat waktu itu Pak Jokowi terbang di atas naik helikopter bersama gubernur dan kalau nggak salah Pak Pratikno, bertiga. Wah Pak Pratikno bilang di sebelah kiri di bawah itu waduh semua sudah hijau ya sudah bagus sekarang. Artinya disentuh lahan-lahan yang kosong itu dengan kelapa sawit.

Cuma Pak Jokowi nyeletuk tapi kasihan ya yang rakyat-rakyat itu mereka hanya selembur surat dari BKPM dan Kementerian Kehutanan, mereka jadi memiliki sekian juta lahan saham, ke mana yang kecil-kecilnya? Nah, ini bahasa komunikasi yang sangat menyentuh, yang begitu-gitu saya selalu selalu catat dalam dalam buku saya ini *statement-statement* yang menyentuh. Tapi itu terjadi mungkin 6, 7 tahun yang lalu periode pertamanya Pak Jokowi itu tapi realisasi setelah itu seperti apa. Nah, kondisi seperti ini yang saya pikir harus-harus betul-betul kita sentuh ini. Mumpung Pak Menteri di sisi situ di sisi eksekutif, kami di legislatifnya dan In Syaa Allah, saya juga mendukung penuh hal-hal yang menyangkut kepentingan lebih luas ke masyarakat banyak.

Kemudian tentu saya mengapresiasi juga bergesernya investasi-investasi negara apa namanya negara-negara lain ke bergeser kepada negara-negara tertentu yang tadi disampaikan. Nah, saya juga kaget lihat data, selama ini kita bicara Cina, Cina, dan Cina lagi tapi ternyata investasi yang besar itu bukan dari Cina gitu, Singapura lebih besar dan lain-lain lebih besar. Nah, ada hal yang saya lihat juga yang perlu juga di-*explore*, hal-hal yang orang memang besar ini juga kita ekspose tinggi Pak Menteri. Mungkin aktivitas Pak Menteri kalau ke Singapura diekspose besar, saya yakin pasti ada komunikasi gitu loh. Misalnya bertemu Phillipe Jourdan dan segala macam itu tokoh-tokoh Singapura itu perlu karena memang mereka lebih besar yang ada di kita gitu loh. Nah, jangan-jangan satu sisi saja sehingga masyarakat ke oh Chanel lagi, Chanel lagi.

Kemudian mungkin karena waktu terbatas saya rasa itu dulu Pak. Jadi saya usulkan atau saya sedikitlah menyampaikan pandangan saya tentang kualitas investasi tadi. Saya kasih contoh yang simpel Pak Menteri barang kali ya. *Let's say*, kita bicara batu bara, contoh batu bara saja. Jadi, kita jangan langsung kasih izin pada saat orang ajukan izin saja apalagi investor luar. Semua bentuk tambang atau apa pun SDA yang kita punya itu jangan langsung izin kemudian itu akan *gone with the wind*, akan hilang kita hanya dapat buruh kasar tapi kita kelola gitu loh.

Kita kelola dengan melibatkan BUMD kalau dia desa, Bumdes Kecamatan juga BUMD dan seterusnya. Itu dirangkum menjadi satu badan usaha sampai tingkat nasional sehingga nanti untuk yang berkaitan dengan eksplorasinya itu kan modalnya nggak banyak sebenarnya. Untuk 1000 hektar barangkali untuk 1.000 kelas kecil saja mungkin sekitar 10 sampai 20 miliar, kan mampu nih BUMD apalagi BUMN ikut di situ. Nah, setelah tahu setelah dapat hasil (***suara tidak jelas***) nya hasil surveinya itu kan jadi barang mahal. Kalau dia ada 100 juta kalau 60 dollar, 6 miliar dollar ada di bawah itu dengan 1.000 hektar.

Nah, pada saat itulah baru kita *invite* investor sehingga waktu yang akan datang, kita udah bagi kalau yang kita punya adalah lahan, izin, kemudian masyarakat, *labour* gitu kita punya. Mereka punya katakanlah *capital*, mereka punya apa namanya teknologi dan mereka punya pasar skor 3:3 atau 4:4, jadi ini 50:50. Nah, bayangkan kalau 50:50 *at the same time* kita bukukan itu, kalau kita lakukan *right issue*, itu akan punya 3 miliar dollar

langsung di tanah 1.000 hektar. Tinggal dibagi pusat dapat berapa, daerah dapat berapa sampai ke desa dapat berapa gitu loh. Nah, ini kalau menurut saya seperti itu dan ini dilakukan oleh negara-negara seperti Cina dan lain-lain cuma mereka terfokus pada BUMN-nya.

Itu sementara Pimpinan.

Terima kasih. Nanti kalau bisa saya usulkan kita ada FGD khusus mencari investasi yang berkualitas. Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Iya.

Terima kasih Pak Jon.

Selanjutnya Pak Nusron dulu kelihatan dari sini, Pak. Pak Nusron mungkin tidak (*suara tidak jelas*) utama ya

F-PG (NUSRON WAHID):

Nggak-nggak.

Terima kasih Pak.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya singkat padat dan memihak rakyat supaya Covid-nya tidak melebar ke investasi.

Pertama-tama, saya tentunya senang dengan adanya peresmian OSS tanggal 9 Desember tahun 2021 bertepatan dengan penyerahan Blok Rokan dari Chevron kepada Pertamina. Semoga itu tanda baik OSS-nya diluncurkan Chevron-nya diserahkan ke Pertamina.

Kemudian yang kedua saya ingin bertanya sama Pak Menteri soal keberpihakan karena Pak Menteri ini latar belakangnya sama dengan kita-kita, orang jalanan yang tentunya juga mempunyai keberpihakan terhadap nasionalisme dan keberpihakan terhadap investor dalam negeri dan ada proteksi terhadap *national interest*. Tetapi, sayangnya *national interest* itu tidak muncul di dalam PP nomor berapa itu yang mengatur tentang daftar negatif investasi perpres, lampiran perpres tentang daftar negatif investasi.

Perpres Nomor 49 ya Tahun 2021 Junto Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang berusaha yang di dalamnya menyangkut tentang daftar negatif investasi, yang menyangkut tentang investasi di sektor infrastruktur telekomunikasi terutama Tower. Di mana di dalam infrastruktur

telekomunikasi di bidang Tower di dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang kemudian direvisi akibat minol rame menjadi Perpres Nomor 49 Tahun 2021, Menteri Investasi kepala BKPM mengusulkan sama presiden yang kemudian diteken oleh presiden bahwa investasi infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk Tower 100% pulih dimasuki asing.

Bapak-bapak sekalian yang saya hormati,

Provider telekomunikasi di Indonesia seluler itu hari ini itu hanya 4 (empat) Telkomsel, Indosat, IM3 dan X3, hanya 4 (empat). Dan hampir semua provider telekomunikasi itu tidak mempunyai *net working*. *Net working*-nya sangat tergantung dengan provider Tower kecuali Telkomsel, tinggal mempunyai 6000. Itu pun sudah mulai di divestasi diserahkan sama saudaranya namanya Mitratel, sehingga kedepan provider telekomunikasi itu sangat tergantung dengan provider Tower.

Berbeda dengan dulu, Tower yang mencari provider seluler ke depan seluler yang mencari provider Tower. Nah, kalau kemudian provider Tower-nya diperbolehkan 100% asing boleh masuk, bagaimana mana nasib kedaulatan dari komunikasi kita. Jadi, saya ingin mengajak merenung bersama karena kita ini mempunyai gelombang frekuensi dan keberpihakan yang sama tentang masalah republik ini.

Memang efeknya terhadap investasi luar biasa. Kemudian, harga Tower itu sekarang *pricing*-nya itu naik menjadi 20 kali Ebitda karena *brand marking*-nya itu adalah *American Tower*. *American Tower* itu di *New York stock exchange* harganya itu 25 kali Ebitda sehingga di Indonesia 20 kali Ebitda. Karena itu nanti, kalau Mitratel akan akan *go public* akan IPO pasti akan laku. Tapi pada satu sisi lain apa artinya? Kenikmatan itu dimiliki oleh siapa? Masuknya investasi asing 100% dalam industri telekomunikasi infrastrukturnya Tower itu juga tidak berdampak menurunkan tarif sewa Tower itu kepada *provider* seluler, tetap juga tinggi. Tidak berdampak terhadap konsumen tarifnya kemudian menjadi turun juga kecuali kalau asing itu masuk 100% kemudian itu kemudian tarif itu menjadi turun, ini tidak juga.

Bapak-bapak sekalian,

Saya ingin mengatakan kalau memang Pak Bhalil itu belum berubah dari zaman aktivis ketika di Papua dan Papua Barat, kemudian tidur di Ponogoro. Sekali-kali ketemu saya dan kadang-kadang juga minta minta dibayarin kopi saya waktu itu masih punya idealisme yang sehat, yang sama yuk kita berpikir tentang republik. Dampaknya apa? Memang dampaknya sudah ada. Salah satu *Tower*, *Provider Tower* yang mudah dijual dibeli 100% asing namanya *Digital Colony* mempunyai sekitar 6.000 *Tower*. Kalau tebig punya 23 *Tower* Protelindo punya 2400 *Tower*, Mitratel punya 24.000 *Tower*. Kalau ini semua berbondong-bondong dijual ke Asia 100%, wafat Pak seluler kita, Pak, *wa tamati riwayatuhu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*.

Saya mengetuk hatinya Pak Menteri Investasi supaya memikirkan ini bersama. Memungkinkan nggak ini kita revisi perpres ini ya kan dalam

konteks lampiran ini karena saya senang dengan Pak Menteri karena Pak Menteri punya jargon, selama bukan hadis masih bisa diubah karena perpres ini adalah bukan Qur'an dan juga bukan hadist saya minta untuk kita sama-sama kita cermati, untuk kita renungkan bersama. Tapi tentunya dengan melihat orbit kanan dan orbit kiri karena saya tahu ini orbit kanan-kirinya soal ini. Nah, sambil merenung orbitnya kondusif, ayo kita sentuh barang ini demi kepentingan republik bersama.

Soal anggaran, Pak, pertama saya kecewa karena diturunkan. Kedua, karena ini urusannya adalah satu dalam dunia perang itu ada arus komando harus sejalan dengan arus kas. Komandonya ini dikasih ke Pak Bahlil tentang Menteri Investasi, targetnya tinggi, komandonya tinggi tapi kasnya kok dikurangi berarti ada *missing*, ada *miss lag* antara hubungan Pak Bahlil dengan hubungan Ibu Sri Mulyani.

KETUA RAPAT:

Kira-kira begitu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kalau Pak Bahlil bisa membuat ketawa Bapak Presiden, kemudian BKPM diubah menjadi kementerian, Pak Bahlil bisa membuat ketawa Anggota Komisi VI sehingga apa pun yang diminta Pak Bahlil di Komisi VI dikasih bahkan minta 4 kadang-kadang dikasih 8, ya kan Pak Bahlil ternyata belum mampu membuat ketawa Ibu Sri Mulyani karena Pak Bahlil nggak bisa menyanyi karena Ibu Sri Mulyani hobinya menyanyi karena itu harus kita siapkan ya lagu band iya kan supaya Pak Bahlil bisa menyanyi sehingga anggarannya naik, karena kuncinya di situ. Buatlah Ibu Sri Mulyani tersenyum kalau nggak mampu membuat Ibu Sri Mulyani belajarlah sama saya, In Syaa Allah biarkan dia bisa tersenyum bersama kita berdua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Itu tausiyah, itu tausiyah. Memang kalau saya lihat itu apa penting kita perhatikan *benefit* kepada masyarakat terhadap tawar-tawar itu tapi juga tidak mengurangi pengawasan kita terhadap oligopoly, itu barang kali Pak.

Selanjutnya Ibu Elly, silakan.

F-PPP (ELLY RACHMAT YASIN):

Terima kasih Pimpinan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Demer beserta seluruh jajaran Komisi VI, juga

Yang saya hormati Menteri Investasi, Bapak Bahlil beserta seluruh jajaran.

Pertama saya sangat mengapresiasi capaian target yang mendapatkan WTP. Namun, tentunya persoalan-persoalan khususnya di dunia usaha di saat pandemi Covid-19 ini masih banyak itu jadi sehingga hal ini juga banyak menyebabkan krisis kesehatan tapi juga menyebabkan perekonomian mereka tumbuh negatif maka resesi dan ini terjadi lebih dari 200 negara. Namun, berbeda dengan negara Cina maupun India. Misalnya di India tahun ini tumbuh positif 13% didorong oleh investasi di sektor digital, India memiliki banyak kesepakatan di bidang konsultasi IT dan sektor digital termasuk juga platform dagang elektronik yang layanan pemrosesan data dan pembayaran digital.

Lalu bagaimana dengan Indonesia seperti apa pertumbuhan investasi di sektor digital tahun 2020 hingga tahun ini? Digitalisasi perdagangan kawasan ASEAN sudah kami dukung minggu lalu sudah disetujui oleh Komisi VI. Bagaimana prospeknya bagi pertumbuhan investasi di Indonesia?

Lalu saya juga sangat mengapresiasi ketika BKPM tahun 2020 waktu itu belum Kementerian Investasi berhasil mengeksekusi investasi mangkrak hingga 58% atau senilai 490 triliun dari total 708 triliun kasus investasi mangkrak. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana realisasi kegiatan dan anggaran 2021 dalam hal kelanjutan investasi tersebut yang sisanya 300 miliar lebih? Apa setelah ada kementerian, apa apalagi setelah ada kementerian dari investasi, kami mohon penjelasannya.

Lalu Kementerian Investasi juga memiliki program yaitu memperkenalkan produk pelaku UMKM, pelaku usaha ke luar negeri ya tetapi program ini mesti berhenti sementara karena Covid-19 dan itu sudah terjadi 2 tahun dan katanya di tahun 2022 ini akan dilanjutkan. Nah, berapa besar alokasi anggaran program tersebut? Dan berapa target UMKM yang akan menjadi sasaran program tersebut?

Mungkin itu saja singkat.

Terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Singkat, banyak dan jelas. Itu singkat, padat, dan jelas, jadi.

Silakan Pak Bardi.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan Anggota Komisi VI,
Pak Menteri dan jajarannya.**

Langsung pada pokok masalah. Yang kami lihat adalah kementerian baru ini dengan anggaran kecil tapi sudah mampu berkiprah mampu menunjukkan giginya sehingga investasi bisa berkembang dengan baik sebagaimana program apa bukan program ya, sering apa namanya logo ya bahwa investasi tumbuh Indonesia maju, luar biasa ini.

Nah, namun demikian kami mencoba melakukan pendalaman sejauhmana upaya hukum fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap majunya investasi nini, tumbuhnya investasi ini bukan hanya ditingkatkan nasional tetapi bagaimana mampu mengendalikan dan mengawal melakukan pengawasan terhadap 500 lebih dari kabupaten, kota yang ada dan 34 provinsi.

Karena apa? Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diberikan mandat kepada Kementerian Investasi untuk bisa betul-betul tumbuhnya investasi. Namun demikian, yang saya lihat, yang saya rasakan di daerah masih banyak peran-peran dari pemerintah daerah yang di luar ketentuan yang telah digariskan oleh pimpinan pusat atau pun kementerian atau dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Salah satu contohnya bahwa proses perizinan dengan sistem OSS luar biasa ini. Tadi disampaikan ada 76.000 lebih itu yang sudah ada NIP-nya. Tetapi di samping itu mereka itu masih tetap setelah mendapatkan NIP itu masih ada proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya ambil contoh dari Jogja, Dapil Jogja ya dari Partai Nasdem, nama saya Subardi. Salah satu contoh kabupaten yang kemarin Pak Menteri beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di Kabupaten Sleman, itu masih ada aturan yang namanya IPPT, Izin Pemanfaatan Tanah.

Yang tidak praktis lagi adalah IPPT itu adalah menjadi dasar untuk mengeluarkan IMB dan macam-macamnya. Tidak IPPT tidak bisa dilakukan apa pun, stagnan. Sebagai contoh usaha kecil udah ada NIP, nunggu *jenengan* naik IPPT keluarnya 6 bulan, baru keluar, itu pun karena ada orang dalam yang bisa bantu.

Nah, IPPT adalah kadang-kadang agak-agak kontradiksi seolah-olah dibuat-buat, jadi begini. Bangunan sudah ada, sertifikat sudah tanah pekarangan, kemudian udah ada IMB, bangunan tidak diubah tapi mesti karena usahanya ganti harus bikin IMB. Jadi memang ada kesan dibuat-buat bahwa IPPT adalah ruang mencari sesuatu atau mencari nafkah atau mencari duitlah kasarnya begitu. Nah, ini terjadi.

Nah, fungsi pengawasan yang apa namanya yang saya sampaikan tadi pengendalian itu sangat perlu bukan hanya di tingkat tapi di seluruh kabupaten, kota. Saya ambil contoh kecilnya tadi. Jadi, ketika OSS jalan tapi juga ada dukungan, ada ketaatan daripada pemerintahan daerah, saya yakin

apa cita-cita Pak Menteri, cita-cita Pak Jokowi, cita-cita kita semua akan terlaksana. Tapi kalau itu tidak, apalagi menteri investasi tidak diberikan payung hukum tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ini dalam rangka untuk campur tangan atau dalam rangka untuk melakukan pengendalian terhadap daerah mustahil itu bisa terlaksana ya.

NIP di sini 76.000 tapi realisasi yang sudah bisa berjalan berapa kalau ada hal-hal yang apa namanya hambatan yang seperti itu. Itu yang yang perlu ingin sampaikan *real* ya. Nah, sehingga apa kita anggaran memadai otomatis Pak Menteri punya tangan. Kementerian itu punya organ untuk menggerakkan SDM-nya, tenaganya, sumber daya manusianya untuk melangkah, melakukan pengendalian dan pengawasan. Tetapi ketika anggarannya kecil mau dari mana? Patungan? Nggak mungkin ya gitu. Ini yang pertama yang ini.

Kemudian yang kedua adalah berbenturannya dengan aturan rancang lain. Undang-Undang Cipta Kerja sudah jelas tapi masih banyak undang-undang yang lain yang masih berbenturan. Saya ambil contoh itu katanya dengan usaha mini market ya. Mini market itu KLB-nya masuk KLBI 47111 masuk dalam wilayah koperasi dan UMKM.

Nah, saya lihat ketika masuk akses di pengembangannya ditolak, nggak bisa masuk. Nah, berarti karena apa ada berbenturan dengan PP 29 Tahun 2021. Nah, hal-hal yang kecil ini lah yang perlu disinkronkan walaupun secara sinerginya Undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang lain mungkin sudah dilakukan.

Tapi turunannya ini yang masih juga harus disinkronkan. Inilah mungkin tugas Kementerian Investasi untuk lebih detail sejauhmana mungkin apakah setahun, apa dua tahun atau 6 bulan, beberapa bulan ini harus dilakukan sehingga apa satu payung hukum ya tentang pengendalian dan pengawasan yang dimiliki investasi ini. Yang kedua adalah benturan-benturan aturan di pelaksanaan itu bisa diselesaikan oleh Kementerian Investasi.

Mungkin itu, terima kasih.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Iya.

Terima kasih, Pak Bardi.

Selanjutnya kalau bisa agak dipersingkat ya karena kita kan jam 12 nih bentar lagi kita jam 2 kita juga ada rapat dengan Menteri BUMN dan Menteri Koperasi. Jadi, kalau bisa ini lebih cepat selesai sehingga kita masih punya kesempatan untuk makan siang. Saya minta fokus kepada lebih banyak kepada anggaran. Kalaupun ada hal-hal lain yang *urgent* yang mau disampaikan ke menteri, lebih singkat daripada membahas anggaran.

Silakan Pak Daeng.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.) :

Iya.
Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pak Menteri Investasi/ BKPM,
Yang saya hormati jajaran Kementerian Investasi,**

Sebetulnya sudah banyak yang diulas oleh kapoksi saya, Pak Jon Erizal. Saya ingin mendapatkan saja sedikit berkaitan dengan sini bicara tentang realisasi anggaran. Memang kalau bicara dulu, saya pernah rapat dengan Pak Menteri itu bicara anggarannya segini tapi targetnya Rp817 triliun. Saya bilang luar biasa hanya orang lincah yang orang bisa loncat-loncat dan akrobat saya bilanganya bisa capai seperti itu.

Tapi *allhamdulillah* terbukti ternyata capaiannya mencapai bahkan melebihi target menjadi Rp826 triliun. Tapi, ketika menteri tadi bicara konteks ke depan ketika mendorong penambahan anggaran 600 miliar dengan target 1.200 triliun ini juga butuh akrobat lagi Pak. Tapi saya ingin menggarisbawahi pada prinsip dasarnya berapa pun sebetulnya, kalau outputnya adalah investasi itu masuk ke kita dan korelasinya nanti nyambung dengan penyerapan tenaga kerja, rakyat kita republik ini ke depan it's *no problem* tapi betul juga yang disampaikan kapoksi tadi bahwa investasi berkualitas sehingga apa? Ketika investasi yang masuk ke kita ini berkualitas maka dampak secara ekonominya juga kita tumbuh.

Itu yang penting sebetulnya. Artinya apa? Implementasi realisasi dari anggaran itu harus berbanding lurus dengan output yang didapatkan terhadap namanya, kemandirian bangsa, pertumbuhan ekonomi, tadi daya beli masyarakat juga. Daya beli ini akan tumbuh? Kenapa sih? Karena investasi ini juga mampu menyerap tenaga kerja kita sehingga tenaga kerja mampu optimal dimanfaatkan oleh investasi tadi.

Nah, sekarang ini kan ada pembicaraan juga misalnya neraca. Negera perdagangan kita itu surplus. Pertanyaan satu kan gitu loh, kenapa menjadi surplus? Ini faktor apa saja gitu loh. Nah, sebetulnya pentingnya, pentingnya investasi yang betul-betul berkualitas, investasi yang betul-betul mengarah kepada kebijakan ke depan itu dengan target Rp1.200 triliun yang dilakukan Pak Menteri, sebetulnya 600 miliar tambahan itu sangat kecil.

Yang penting sebetulnya arahnya jelas, strateginya jelas, keberpihakannya juga jelas. Apa pun itu jangan sampai kita yang tadi dibilang Pak Jon Erizal, kita untuk mencapai target cuma satu akhirnya investasi yang diobral yang penting target itu tercapai tapi output hasilnya tidak berdampak secara signifikan buat kepentingan rakyat kita. Itu saja catatannya. Prinsip dasarnya sama dengan Gus Nusron.

KETUA RAPAT:

Iya

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.) :

Kalau Pak Menteri ingin menaikkan itu dan mendorong tambahan itu saya secara pribadi sangat mendukung. Yang penting ini berdampak buat seluruh kepentingan dan kedaulatan rakyat Republik Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nadanya hampir semua sama, Pak Menteri. Jadi, dari Pak Nusron, Pak Bardi tadi, Pak Jon kemudian ada Pak Daeng, ada Ibu Nevi, ada Ibu Elly hampir sama nadanya ya itu sangat prihatin dengan kondisi anggaran yang dicapai oleh Menteri Investasi. Dan selanjutnya mungkin sama Pak Menteri, teman-teman yang lain pasti akan prihatin karena ada peningkatan kekuasaan namun ada penurunan daripada anggaran. Mudah-mudahan teman-teman yang lain tidak mengulang-ngulang lagi dukungan yang itu berlama-lama. Boleh saja mengulangi sebentar tapi jangan berlama-lama lagi sehingga rapat kita bisa lebih cepat gitu ya untuk kita selesaikan.

Selanjutnya, ke sebelah kanan Bu Sondang.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan, Pak Demer.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi Pak Menteri dan seluruh jajarannya,

Terima kasih.

Pertama-tama, saya mau mengapresiasi dulu kinerja yang sudah dicapai oleh abang dan menteri terhadap anggaran di tahun 2020 bagaimana mencapai 90,65% dan juga KPI yang sudah dicapai di tahun 2020. Kalau di sini dilihat realisasi penanaman modal *over* dari pada target, kemudian realisasi peradaban sektor sekunder dan lain sebagainya bahkan semuanya pada *over*. Nah, cuma saya mau menggarisbawahi, apakah target yang memang dicapai bahkan lebih daripada itu sebenarnya mungkin targetnya yang di *setting* kekecilan, bisa jadi seperti itu kan gitu.

Nah, tapi yang saya mau garis bawah lagi adalah bahwa di sini KPI Kementerian Investasi di point nomor 5 adalah peringkatan peringkat kemudahan berusaha *ease of doing business* di sini belum di-*realese*. Karena apa? Kita bicara kalau masalah mengenai Kementerian Investasi pasti ujung-ujungnya mau anggaran seberapa pun kalau *ease of doing business*-nya di masih dipersulit tidak akan pernah tercapai yang namanya target realisasi investasi. Jadi, dari tadi teman-teman mengkritisi bahwa anggarannya terlalu kecil-terlalu kecil.

Saya rasa apakah sebetulnya anggarannya yang terlalu kecil atau yang kedua apakah memang perizinan yang dilakukan saat ini memang masih sulit sehingga apa namanya baik itu penanaman modal dalam asing atau penanaman modal negeri masih sulit dalam hal menanamkan investasinya atau memang kombinasi daripada keduanya. Karena apa? Kami mendapatkan aspirasi dari masyarakat saat ini masih sulit sekali mendapatkan perizinan, masih dipersulit.

Kita jujur, kita harus jujur bahwa OSS yang saat ini sudah dilakukan di *launching* itu masih para pengusaha-pengusaha baik PMA maupun PMDN masih terus harus menjalani meja setiap meja, Pak. Mungkin saat ini masih ada terkendala di kepala-kepala daerah, kepala daerah beres di kementerian teknisnya masih belum bisa. Nah, bagaimana apa namanya mimpi kita memiliki satu *online single submission* bahwa kita tidak perlu menjalani seluruh meja, itu membutuhkan waktu dan energi serta biaya. Karena, kami yakin sekali baik negara-negara asing atau investor asing ketika melihat *resource*-nya di Indonesia itu sudah baik-baik itu *natural resources*, *human capital*-nya mereka akan masuk tetapi ketika *ease of doing business*-nya susah, sulit, tidak akan masuk.

Jadi, apa namanya catatan kami adalah di sini kita mau memperjuangkan anggaran sebesar apa pun tetapi kalo tidak di-*solve* akar permasalahannya, nggak akan tercapai target daripada realisasi investasi tersebut. Oleh karena itu, kami mengusulkan saya tidak tahu saat ini apakah di Kementerian Investasi ini sudah terbentuk. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang masih sulit untuk mendapatkan perizinan, mereka harus mengadu ke mana. Itu harus dibuatkan satu-satu badan atau apanya dirjen sendiri untuk supaya men-*solve* dari pada apa namanya izin-izin yang mereka sulit untuk mendapatkan yang apa namanya tidak bisa tercapai karena tanpa ada itu iya niscaya sia-sia saja yang akan di yang kita perjuangkan selama ini.

Itu saja mungkin usulan atau masukan dari kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Iya, tadi disampaikan ke Pak Menteri bahwa memang digitalisasinya belum berjalan dengan baik belum hadir. Namun, ada ide bagus juga dari Bu Sondang ini bahwa buat tim sementara untuk *solving problem* untuk jalan jangka pendek ini, begitu Pak Menteri. Jadi, bikin tim untuk *solving problem*-nya jangka pendek ini sehingga apa tidak menjadikan malah bulan-bulanan nanti Kementerian Investasi ini. Saya rasa bagus juga idenya untuk sementara sebelum dalam rangka penyesuaian-penyesuaian daripada ke arah apa izin bersama dan digitalisasi ini, itu.

Terus ke sini ada Pak Nyat di sini. Selamat datang Pak Nyat di Jakarta

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Siap Pak

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Nyat

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin nanti bertanya Pimpinan

KETUA RAPAT:

Sudah dicatatnya Pak Deddy ya

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Siap, makasih

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan Bapak-bapak, Ibu Anggota DPR RI,
Pak Menteri, Kementerian Investasi/Kepala BKPM beserta jajaran,**

Saya kira sudah banyak dibicarakan ya oleh teman-teman. Saya apresiasilah semuanya fokus pada anggaran saja. Investasi anggaran, saya kira bagus sekali tahun 2020, tersisa hanya 2,35%. Meskipun saya mempertanyakan itu belanja pegawai 5 tersisa 5 miliar itu apa sebabnya belanja barang segala macam itu, apakah pegawainya berhenti atau gimana gitu.

Kemudian apresiasi terhadap di realisasi tahun 2020 melebihi target. Semuanya melebihi target ini ya dari 817 menjadi 286 kemudian juga realisasi modal sektor sekunder dan lain-lain ya. Cuma ini saya mau tanya ini aja Pak ke peringkat kemudahan berusaha kita ini targetnya 60 tapi masih menunggu *world bank* ya realisasinya. Kalau sekarang kita angkanya berapa kita capai Pak ya targetkan 20 tahun 2020 itu, peringkat mudah berusaha.

Kemudian 2021 ya anggaran ya tercapai udah 55% sampai bulan sekarang ini ya bulan bulan apa ya Agustus sudah baguslah.

Kemudian mendukung anggaran tambahan ya. Jadi, kalau soal cerita anggaran-anggaran yang sangat kecil ini sudah 7 tahun ya kita bahas pernah mencapai 1 triliun. Tahun berapa itu ya Pak Menteri? Tahun berapa itu 1 triliun? Sekarang kan cuma 7, 800?

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Izin Pimpinan.
2021 sesungguhnya 1 triliun lebih tapi *refocusing-refocusing* 4 kali

KETUA RAPAT:

Oh, iya.

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Sampai menjadi 830.

Demikian, Pimpinan.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Iya, jadi sangat logislah itu kita mendukung tambahan anggaran tahun 2022 dari pagu 711, tambahan 600 sangat wajar dengan target pencapaian 900 triliun ya Pak Menteri, ya. Nah, kemudian tahun 2021 ini sampai bulan ini sudah tercapai, ini juga apresiasi 442 apa namanya realisasi (*suara tidak jelas*). Nah, saya tanyakan ada sedikit penyerapan tenaga kerja sampai pada bulan ini Pak, Pak pada angka 442 ini.

Saya kira itu aja, Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nyat karena pendek jadi saya terima kasih

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Iya?

KETUA RAPAT:

Karena pendek pertanyaannya saya terima kasih Bapak

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Iya, iya pendek sekali

KETUA RAPAT:

Jadi, selanjutnya ke Kapoksi PDIP, Pak Adi.

F-PDIP (ADISATRYA SURYO SULISTO):

Terima kasih, Pimpinan.

Kita juga pendek-pendek aja kok,

Saya hormati.

ANGGOTA:

(suara tidak jelas) nggak boleh tanya tadi.

F-PDIP (ADISATRYA SURYO SULISTO):

**Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran,
Pimpinan dan teman-teman Komisi VI yang saya hormati,**

Saya kira sudah banyak dari teman-teman yang menyinggung soal apa namanya anggaran. Kalau saya lihat di sini kinerja Pak Menteri bagus sekali untuk dari segi penyerapan anggaran di tahun 2020, 97% lebih juga pencapaian realisasi kinerjanya juga saya lihat di sini semuanya melebihi target realisasinya. Jadi, selamat Pak Menteri termasuk juga peluncuran dari OSS, saya mengikuti waktu peluncurannya itu bagus sekali. Nah, Pak Menteri di sini ada sebaran penanaman modal berkualitas ya. Kriteria berkualitas dari Kementerian itu apa mungkin nanti bisa dijabarkan? Apakah dari besaran investasinya atau pelibatan dari usaha-usaha UKM setempat lokal atau memperhatikan juga lingkungan faktor lingkungan? Sekarang kan menjadi menjadi sesuatu yang sangat penting ya atau adanya *transfer of teknologi* mungkin kepada pemain lokal. Nah, apa yang dimaksud oleh Kementerian Investasi dengan penanaman modal berkualitas? Mungkin kriteria-kriteria itu bisa lebih dijelaskan kepada kami semua, Itu yang pertama.

Yang kedua, di tahun 2021 ini kami melihat BKPM telah meluncurkan program kemitraan antara perusahaan dengan UMKM ya. Ini sangat bagus, Pak Menteri sangat konsen terhadap pelaku-pelaku UKM untuk memajukan dan memberdayakan pengusaha lokal. Nah, tentunya penting juga Pak Menteri bagaimana kita bisa mengukur program ini itu berjalan. Nah, ini apa indikator ya yang kita bisa pegang untuk memajukan pengusaha-pengusaha UKM di tingkat lokal? Ya, maksud Pak Menteri baik tentunya memajukan pengusaha-pengusaha daerah tapi jangan sampai ini hanya program tetapi tidak bisa diukur dengan jelas pencapaian seperti apa. Jadi, mungkin kita perlu penjelasan juga indikator-indikator apa yang kita bisa pakai dalam hal ini.

Yang ketiga, Pak Menteri kalau peringkat kemudahan *ease of doing business* ini kan cerminan dari seluruh kerja keras Pak Menteri. Ya, kita harapkan angka dari *World Bank* ini bisa meningkat ke *ease of doing business* Indonesia. Nah, kalau dari pembicaraan atau pembahasan kami dengan apa investor asing itu yang mereka juga takuti adalah itu dalam hal *enforcing contract*. Jadi, bagaimana kontrak itu sesuatu yang sakral tentunya

di dalam perjanjian yang harus dihormati ya. Nah, ini yang menjadi faktor ketakutan para investor asing. Tentunya ini tidak hanya melibatkan institusi Pak Menteri karena ini melibatkan juga dari institusi hukum kita ya tapi ini juga akan mencerminkan menurut saya *ease of doing bussiness* Indonesia kenyamanan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, kita harapkan dari segini ininya juga bisa diperbaiki ya dan semoga dan tentunya ini membuat para investor juga lebih nyaman untuk datang ke Indonesia.

Mungkin itu saja masukan dari kami, pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wah, Pak Kapoksi rupanya cukup singkat dan padat. Pak Menteri mudah-mudahan lain juga saya coba memperpanjang dulu Pak Menteri ya kita perpanjang setengah jam Pak Menteri, ya?

(RAPAT : SETUJU)

Setengah jam ini masih ada yang virtual 1,2,3,4,5,6 masih ada 6 masih ada 6 yang virtual dan nanti selesai, Andre sudah keluar nggak jadi nanya jadi kita lebih singkat Pak Menteri.

kalau, saya silakan Pak Marwan, masih ada Pak Marwan di virtual?

F-PKB (MARWAN JAFAR):

Masih-masih Pak, masih

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Marwan, silakan.

F-PKB (MARWAN JAFAR):

Bisa Pak?

KETUA RAPAT:

Bisa-bisa kita denger Bapak.

F-PKB (MARWAN JAFAR):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya singkat saja pertanyaan saya karena temen-temen sudah banyak yang mendalami.

Ada satu hal saja Pak Pak Bahlil, saya ingin tanya tentang Pak Bahlil tentang sekaligus eksplorasi kebijakan dan pemikiran tentang penerapan efektivitas hukum lingkungan yang berdampak kepada pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks memajukan. Ini adalah penting menjadi bagian dari *blueprint* semacam *blueprint* kementerian baru, Pak Bahlil juga sibuk mengurus SOTK dan lain-lain. Oleh karena itu, saya minta pandangan dan eksplorasi baik secara akademik maupun dari sisi kebijakan.

Saya kira itu singkat Pak Ketua, pertanyaan saya.
Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Dan soal anggaran sepenuhnya kami mendukung dari yang disampaikan Pak Bahlil.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Marwan singkat, jelas, dan padat.

Selanjutnya Bapak, Pak Edi Baskoro

F-PD (DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

Baik.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Lupa ya sama saya ya Pak Ketua ya?

F-PD (DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

Bu Evita, saya duluan apa *ladies first* ya gimana Pak

KETUA RAPAT:

Ada catatannya Bu, ada Bu ini sedang kita atur tenang aja ada catatannya ada 6.

F-PD (DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

Saya nggak enak, saya sangkain dari PDIP 4 pembicaranya ada Pak Kapoksi, ada apa Ibu Evita, Ada apa Pak Mufti, ada Pak Ananta, ada Pak Deddy, 6 Sondang. Sabar dulu Ibu Evita

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Nggak saya sabar saya pikir menurut jadwal mendaftar gitu loh

F-PD (DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

Terima kasih, Ibu Evita.

Pimpinan, Anggota Komisi VI yangs aya hormati,
Menteri Investasi.

ANGGOTA:

BPKM

F-PD (DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

Terima kasih atas presentasinya

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pak Ibas, ada Andre Rosiade di sini Pak

F-PD (DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

Oh Pak Andre bukan Andre Agasi nih ya.

Apresiasi Pak Menteri atas kinerja investasi yang selama ini kita ketahui anggaran kecil tapi target realisasinya juga harus besar gitu. Investasi kita penting, penting sekali untuk perekonomian. Pak Menteri nih orang yang paling dicari-cari bagaimana tidak ya di saat pandemi ini kan banyak yang terkena dampak, tekanan, paceklik, ada yang terlilit, bahkan gulung tikar, dan cabut dari Indonesia tapi telah yang (*suara putus-putus*) tangan dingin Pak Menteri ini bisa berubah situasi yang kita alami saat ini.

Saya dukung Pak investasi yang berkualitas seperti apa yang disampaikan Pak Jon Erizal, investasi berkualitas Indonesia. Apalagi kalau merata merata ini memang sekarang Pak Menteri fokusnya kan luar Jawa kan bukan berarti di Jawa tidak diperhatikan juga. Saya pikir merata dan komposisi yang tepat karena sekali lagi potensi kita menyeluruh di seluruh tanah air yang untuk menciptakan *multiplayer effect* termasuk juga menciptakan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan tentunya pasti kematian prestasi ini kan sudah punya matriks seperti sampaikan Pak Herman tadi dengan data yang lengkap atau big data lah ya sesuai dengan skenario-skenario, prioritas, dan keunggulan tentunya.

Nah, pertanyaan-pertanyaan detail tadi sudah banyak disampaikan teman-teman. Saya hanya ingin menggarisbawahi saja secara general kalau hanya anggaran kami memahami dan menerima usulan anggaran pagu indikatif tahun 2022 dari Kementerian Investasi ini.

Nah, pertama realisasi PMA terbesar ini berasal dari Singapura ya Pak Menteri ya sedangkan sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura itu adalah perusahaan multi nasional. Kalau bicara Singapura, kita tidak hanya bicara orang-orang atau perusahaan Singapura tetapi di Singapura ini sini banyak sekali kantor perwakilan dari perusahaan-perusahaan multi nasional termasuk orang Indonesia. Nah, apakah Menteri Investasi atau BKPM dapat melacak lebih jauh bisa jadi Singapura ini hanya merupakan tempat singgah atau sebagai tanda kutip *broker*-nya saja, Pak. Mungkinkah negara kita atau investor yang sebenarnya juga bisa langsung melakukan *direct investment* ke Indonesia. Apalagi di Indonesia ini juga memiliki pasar yang sangat besar. Mereka semua tahu 170 juta angkatan muda Indonesia juga bertalenta dan saat-saat sekarang ini mereka memiliki daya beli yang cukup kuat dan semoga itu semua juga ikut sertakan dari daya saing kita yang terus meningkat.

Nah, saran saya mungkin ini karena masalah pandemik tapi beberapa negara sudah menjadikan endemi diperlukan gerakan-gerakan *investment*, *event* apakah itu skala dunia di nasional dan juga bahkan di daerah-daerah agar mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka bisa diinvestasikan dan seterusnya.

Yang kedua, seiring dengan krisis pandemi Covid-19 tentunya terjadi penurunan dalam kinerja sektor pariwisata di kawasan ini, Pak Menteri kan hadir ya dalam sidang promosi. Saya bagaimana saya juga mempertahankan disertai saya terkait strategi pembiayaan investasi. Nah, saya ingin komitmen dan juga kesungguhan dari Menteri Investasi agar ada program berkelanjutan di lokasi-lokasi wisata lain, tanah air kita walaupun kita ketahui sektor ini sedang lesu-lesunya di saat pandemi Covid -19. Jadi, jangan lupa Pak Menteri untuk terus diperhatikan secara berkelanjutan untuk mendorong pengembangan kinerja realisasi investasi di lokasi wisata super prioritas. Jangan sampai program-program atau *project-project* yang sudah berjalan ini menjadi mangkrak gitu Pak ya.

Kemudian tolong tetap dipastikan agar BKPM Kementerian Investasi juga mengundang para calon investor untuk meningkatkan investasinya di sektor-sektor ini. Di saat sekarang ini, di saat sekarang ini saat yang tepat untuk kita memulai investasi di bidang pariwisata. Ketika pandemi selesai saya yakin tempat-tempat tersebut akan menjadi kunjungan yang luar biasa dalam tentunya mendorong pembangunan sektor pariwisata yang terpadu, inklusif dan berkelanjutan. Jangan sampai hanya perusahaan-perusahaan besar saja, investasi-investasi besar saja yang sifatnya beton tetapi juga investasi yang berskala mikro baik dari nusantara dan juga dunia.

Yang ketiga, yang terakhir Pak Pimpinan. Saya sepakat bahwa apa yang diterapkan oleh kementerian saat ini sangat baik ya *online system submission* ini juga merupakan program digitalisasi ekonomi kita ingin ke depan untuk lebih terintegrasi. Namun, saya masih menilai sosialisasinya masih terasa kurang termasuk strategi sosialisasinya jangan pun OSS berbasis risiko, proses yang sebelumnya saya masih sangat kurang pemahaman masyarakat. Jangan sampai kementerian ingin lari *sprint* tetapi

justru pengusaha-pengusaha di daerah tertinggal, tidak semua pengusaha itu seperti yang di Jakarta tapi juga mereka juga perlu pemahaman, pembelajaran intinya. Kami siap terus memonitor sistem OSS tersebut dan sosialisasinya harus ditingkatkan kemudian hari.

Sekian dari kami

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ibas.

Ini ada lagi ada Ibu Evita, ada Pak Mufti, ada Pak Ananta, ada Pak Deddy Yevri Sitorus. Karena ini semuanya dari PDIP, saya minta agak dipersingkat apa penyampaiannya dan tentu ya fokus pada rapat hari ini yaitu tentang anggaran, lebih banyak kadang nanti dan lain-lainnya kadang-kadang ngobrol ini yang lain-lainnya, lebih banyak daripada apa yang kita rapatkan gitu. Saya minta mungkin lebih efektif, efisien karena waktu juga kita akan rapat lagi di jam 2 di dengan BK Kementerian Koperasi dan BUMN.

Silakan, Bu Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Kalau PDIP banyak wajar Pak, Anggota kita 12 orang di sini Pak di Komisi VI ini jadi wajar kalau kita lebih banyak.

Pak Menteri, terima kasih penjelasan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya apresiasi Pak, kenapa saya katakan apresiasi? Bahwa di tengah-tengah pandemi ini Covid-19, Kementerian Investasi dan BKPM ini bisa mencapai target Pak, boleh dibilang yang 2021 kalau dilihat capaian target dari tahun sebelumnya di bulan yang sama itu sudah melebihi Pak. Dan kita tahu semakin banyaknya investasi ini tentunya penyerapan tenaga kerja itu akan semakin besar.

Kemudian Pak Menteri tadi disampaikan bahwa teman-teman saya setuju jadi Pak Menteri juga bisa *take a note* ya bahwa tidak hanya besaran investasi saja yang menjadi konsen kita tapi investasi yang berkualitas Pak Menteri. Jadi, itu juga yang menjadi harapan-harapan kita semuanya karena investasi saya ingin tahu Pak Menteri investasi yang capaian Bapak sampaikan ini. Ini kan capaian dari semua sektor Pak ya, investasi semua sektor termasuk BUMN ya Pak gimana Pak Menteri?

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Bu, investasi ini minus jasa keuangan ya sama hulu migas.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ok minus jasa keuangan dan hulu migas

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Jadi, hulu migas dan sektor keuangan bukan merupakan bagian domain yang menjadi tupoksi Kementerian Investasi jadi kalau BUMN yang di hulu migas sektor keuangan enggak termasuk Bu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ok tapi di luar itu masuk ya Pak Menteri ya. Nah, ya kenapa saya sampaikan seperti itu Pak? Karena saya katakan itu sudah luar biasalah kerjanya di tengah pandemi ini ok tapi kenapa Pak di penilaian kemudahan berinvestasi itu Indonesia ini di negara Asean itu masih urutan dari 6 Pak dari 8 negara. Itu bagi saya menjadi pertanyaan Pak Menteri ya kan kenapa kita masih menjadi apa namanya urutan yang ke-6 dari 8 negara untuk kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi ya kan. Penilaian itu mungkin bisa diberikan juga Pak Menteri dicari sebabnya itu kenapa.

Tadi halaman 4 Pak Menteri, Pak Menteri kan sudah menjabarkan bahwa apa namanya investasi di mikro, di menengah, di kecil, iya Pak Menteri ya di menengah dan kecil. Kemudian nah saya lihat investasi jumlah investasi yang kita dapat sekarang di halaman 4 presentasi Pak Menteri tadi 92% itu dari usaha mikro halaman 4 coba di buka iya kan Pak Menteri coba di halaman 4 presentasi Pak Menteri tadi bener nggak Pak?

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Itu NIB Bu, ya NIB yang 99%, 70.000 lebih itu adalah UMKM betul UMKM.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Iya berarti.

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

NIB Bu bukan realisasi investasi yang sudah berjumlah 400, itu berasal UMKM. Jadi

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Iya maksud saya ini kan berarti kan memang potensi UMKM, ini kan luar biasa Pak

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Oh iya betul setuju-setuju

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Jadi, yang paparan Pak Menteri tadi itu Pak. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana dengan undang-undang yang ada sekarang ini bahwa kalau ada investasi dari luar itu Pak Menteri wajib menginginkan untuk dengan UMKM Pak, itu maksud saya, Pak.

Kalau BUMN-kah sudah bikin peraturan Pak bahwa yang BUMN itu 15 miliar atau bagaimana Pak itu mereka boleh UMKM yang ikut tender gitu, Pak. Nah, ada aturan juga investasi asing itu ke Indonesia itu harus melibatkan UMKM yang ada. Jadi, jangan sampai yang Pak Menteri paparan tadi begitu besarnya potensi UMKM kita, itu tidak ada aturan yang bahwa mereka harus menggandeng UMKM Pak ketika mereka itu masuk apanya Pak ke Indonesia sebenarnya potensi investasi asing besar Pak di daerah saya aja Pak Menteri di Grobogan, 1 kabupaten saja Pak Menteri itu ada beberapa yang namanya investasi dari asing.

Pak itu di Kabupaten Grobogan itu ada investasi Korea Pak, itu PT Pungkook Indonesia itu namanya Michael Kors, itu namanya Coach itu tas-tas itu Pak dibuat di kabupaten saya Pak di Grobogan yang branded-branded itu Pak dan dia menyerap tenaga kerja 12.500 Pak di Grobogan, Pungkook yang dari ini apa namanya dari Korea saya kepengen kapan Pak Menteri ke Grobogan. Kita ketemu mereka-mereka pak yang apa namanya.

Kemudian dari Cina juga Pak itu PT Formosa itu tas dan kulit juga Pak itu menyerap tenaga kerja luar biasa Pak 3.500 orang Pak banyak yang lain-lainnya Pak di Grobogan. Ini orang saya sendiri juga nggak begitu mendalami, sebelumnya saya baru tahu rupanya itu investasi itu cukup banyak. Nah, kapan Pak Menteri ada waktu Pak Menteri, kita sama-sama ke Grobogan kita ketemu sama investor-investor kita Pak Menteri katakan di Pati itu kan juga ada investor baru masuk Pak di Kabupaten Pati.

Saya waktu itu saya bilang Pak Menteri itu dapil saya, Pak Menteri nanti kapan *launching*-nya. Saya itu dong saya bilang ke Pak Menteri kan berarti Dapil saya sendiri saya lihat investor itu sudah berdatangan jadi tidak heran saya kalau dilihat investasi kita ini meningkat. Saya lihat dari yang yang yang kecil saja di *scoop* di dapil saya. Jadi, potensi itu besar Pak Menteri. Dan saya harapkan dengan naiknya status dari pada BKPM yang hanya sifatnya berkoordinasi selama ini menjadi Menteri Investasi tentunya investasi kita ke depan akan semakin besar lagi.

Saya rasa demikian, Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Merdeka!

Jadi, ibu Evita kita mungkin waktu pertama-tama kita membacakan apa aturan dari rapat mungkin belum didengar oleh Bu Evita ada yang di nomor 11 tadi saya batalkan bahwa sebenarnya setiap anggota berhak mengikuti rapat fisik dan virtual dan untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui juru bicara dari setiap anggota fraksinya. Jadi, sebenarnya dalam masa PPKM ini harusnya hanya juru bicaranya dari fraksi tapi kita dari Komisi VI memang membuka lebih lebar apa namanya apa rapat-rapat ini.

Ini mungkin dimaksudkan oleh Ketua DPRRI, Bu Puan dan wakil-wakilnya ini untuk mempersingkat waktu rapat-rapat kita. Memang waktu pun diberikan jadwal 2 jam maksimum dan penambahannya 30 menit maksimum itu aturan dari Pimpinan DPRRI. Nah, untuk itu kita tetap di sini membuka lebih lebar sedikit tapi kami.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Kalau bikin aturan seperti itu, bikin aja aturan Pak kalau memang aturannya seperti itu. Setahu saya itu aturan dibuat PPKM pengetatan level 4 yang kita enggak boleh kehadiran fisik. Sekarang kan kita sudah bisa kehadiran fisik di Komisi Pak Ketua. Itu saja Pak. Terima kasih kalau aturannya cuman satu, saya enggak bicara katakan saja aturan cuma satu saya enggak boleh bicara saya enggak gitu loh gampang kok.

KETUA RAPAT:

Ga, kita lebih kekeluargaan di Komisi VI ini. Jadi, untuk itu ada kekeluargaan juga teman-teman untuk apa apa bicarannya mungkin lebih singkat untuk kita sama-sama menjaga prokes ini. Ini kita masih dalam rangka aturan itu masih berlaku sampai sebelum dicabut, itu.

Kami persilakan Pak Mufti Anam, masih ada Pak Mufti?

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Siap-siap ada Pak, *nggeh*.
Terima kasih Pimpinan atas kesempatannya

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Baskoro.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Siap Bos.
Terima kasih kesempatannya.

Yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Pak Mufti Pak Mufti kalau enggak salah dari HIPMI ya?

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Iya bos, *nggeh ngapunten*.

Yang terhormat Pak Menteri BKPM, Pak Bahlil Lahadalia.

Saya lihat Pak Menteri setelah menjadi menteri semakin paten. Saya lihat dari jauh semakin cerah Pak.

ANGGOTA:

Tambah ganteng gitu loh tambah ganteng gitu loh.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Iya, saya lihat juga di belakang Pak Menteri, ada Wamen BKPM Pak Eka Sastra semoga segera dilantik Pak.

Jadi, pertama-tama kami sampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian BKPM di bawah Pak Bahlil Lahadalia. Berkat kerja keras Pak Menteri bersama kepala daerah, lintas kementerian dan tentu dalam koordinasi BKPM realisasi investasi semester I-2021 telah mencapai 442,8 triliun Pak Menteri ya atau sudah hampir 50% dari target tahun ini 900 triliun. Juga selamat Pak Menteri atas peluncuran OSS berbasis risiko yang pada 9 Agustus lalu semoga itu semua menjadikan iklim kemudahan berinvestasi di Indonesia semakin baik ke depan begitu.

Nah, kemudian terkait pagu anggaran 2022 BKPM ada sekitar 711,5 miliar, Pak Menteri. Lalu kami lihat tadi ada usulan tambahan anggaran 600 miliar. Nah, ini yang RP yang 600 miliar ini ada untuk peluang investasi eksekusi realisasi investasi mangkrak hingga Satgas Percepatan Investasi. Nah, harapan kami, Pak Menteri kalau bisa Pak Menteri ini di-*detail*-kan Pak Menteri dengan tambahan anggaran itu maka berapa sih sebenarnya tambahan investasinya karena seberannya usulan tambahan anggaran ini kami sudah sangat melekat pada tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Investasi atau BKPM.

Nah, kemudian tambahan juga untuk Satgas Percepatan Investasi yang baru saja dibentuk oleh pemerintah dimana Pak Menteri Bahlil duduk sebagai Ketua Satgas dengan Wakil Ketua adalah Wakil Jaksa Agung dan juga Wakapolri. Nah, kami sangat apresiasi Pak Menteri atas hadirnya Satgas Investasi ini tapi catatan dari kami tentunya Pak Menteri:

1. Kalau saya baca di Keppres Nomor 11 Tahun 2021 memang masih sangat general sesuai dengan sifatnya perpres itu sendiri. Nanti kami harapkan Pak Menteri sebagai Ketua Satgas bisa langsung secara

lebih teknis terutama ini terkait pengawalan sampai tuntas yang menjadi tugas satgas agar jangan hanya investasi skala besar yang menjadi atensi satgas, begitu Pak Menteri. Mungkin kedepan bisa dipetakan investasi skala menengah yang di daerah yang selama ini juga menjerit yang maju kena, mundur kena. Nah, Pak Menteri kan sudah pernah merasakan ketika jadi pengusaha dulu bagaimana kondisi di daerah. Nah, kita sebenarnya sama-sama paham soal ini maka harapan kami bisa dikawal Pak Menteri;

2. Ini kaitanya dengan poin yang pertama. Perlu dipetakan target di daerah-daerah dengan melibatkan instrumen sesuai dengan struktur Satgas yaitu kejaksaan tinggi dan polda di tingkat provinsi serta kejar dan polres di tingkat kabupaten. Kan itu nanti ketahuan ada di OSS Pak Menteri ada Investasi A, ada Investasi B langsung saja satgas bikin tim untuk bergerak mengawal sampai tuntas hingga ke lapangan begitu agar semua masyarakat bisa merasakan dampak dari adanya hadirnya satgas di tengah-tengah masyarakat ini begitu, Pak Menteri.

Nah, kemudian yang terakhir Pak Menteri yang ini kami ingin kami sampaikan adalah bagaimana agar investasi yang masuk itu tidak kemudian membuat mati industri sejenis yang sudah eksis yang ada di dalam negeri kita. Sebagai contoh Pak Menteri, industri semen yang investasinya beberapa tahun terakhir masih saja terus masuk padahal supply sudah sangat melimpah yang kemudian memicu praktek persaingan tidak sehat seperti (*suara tidak jelas*) banting harga, ugal-ugalan dari semen luar negeri yang kemudian yang kemudian membuat industri semen dalam negeri kita sangat sulit.

Nah Pak Menteri dan BKPM saya kira.

KETUA RAPAT:

Yah ke *mute* itu. Pak Mufti ke *mute* Pak Mufti.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ini suaranya hilang urusan semen kok ada yang ini nih yang matiin suara.

KETUA RAPAT:

Suaranya hilang ke *mute* itu.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Oh iya ke *mute* ya ok sorry ke *mute*.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Santai bos ku santai.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Iya.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Saingan sama Andre Rosiade.

KETUA RAPAT:

Tadi baru sampai semen tadi.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Urusan semen ulang lagi biar kita denger Mufti.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Betul-betul.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ulang lagi - ulang lagi

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Penting.

Mohon izin, Pimpinan.

Buat kami penting di daerah gitu. Pak Menteri dan BKPM juga saya kira perlu mengawal investasi yang masuk tidak kemudian membuat resah masyarakat. Sebagai contoh Pak Menteri sebulan yang lalu viral pabrik semen di Kutai Timur yang itu milik PT Kobexindo Cement yang ramai diduga ada pelanggaran di mana sejumlah TKA-nya telah habis di sana, juga ada laporan di sana bahwa jumlah TKA yang ada melebihi apa yang dilaporkan kepada pemerintah.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Hajar terus, hajar.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Mohon izin Pak Andre.

1. Terkait itu tentu tentang aturan. Mohon ini Pak Menteri agar BKPM membangun sistem koordinasi yang bagus agar jangan investasi yang niatnya untuk menggerakkan ekonomi malah kemudian membuat sentimen negatif karena persoalan-persoalan teknis macam itu;
2. Kembali kita ingatkan soal moratorium Pabrik Semen baru. Dulu saya sangat ingat betul Pak Menteri berjanji tidak akan ada izin baru terkait

semen ini tapi di media belum lama ini Kementerian Perindustrian bilang moratorium tak berlaku untuk wilayah Indonesia Timur, Masha Allah ini Pak Menteri. Nah, padahal suplai dari pabrik eksisting untuk daerah di sana itu sudah sangat besar begitu.

Nah, kalau kita lihat data, kapasitas produksi semen nasional saat ini 115 hingga 120 juta ton dari seluruh pabrik. Per tahun permintaan semen sekitar 62,5 juta ton artinya Pak Menteri, kita *over supply* sekitar 52 juta ton, utilisasi pabrik hanya 55%.

Bahkan kalau Pak Menteri, kita tambahkan dengan apa ekspor misalnya utilisasi kita pabrik kita hanya jadi 64%. Terjadi *missmatch* antara laju kenaikan permintaan semen yang tadi karena perlambatan ekonomi, melemahnya daya beli, dan sebagainya dan kenaikan kapasitas produksi semen yaitu yang seperti kami sampaikan karena banyaknya pabrik-pabrik baru yang diizinkan masuk ke dalam negeri kita.

Nah, maka dengan masih terbukanya izin pabrik semen baru ini Pak, kapasitas produksi semen di Indonesia akan terus bertambah. Masalahnya Pak Menteri permintaan semen belum tumbuh signifikan. Kalau kita lihat data dalam 8 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan semen hanya 1,2% Pak Menteri. Padahal pada tahun 2020 penjualan semen domestik berkontraksi minus 10,4% jika dibandingkan periode tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019.

Nah, pertumbuhan penjualan semen tahun 2020 adalah yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Bahkan Pak Menteri pemulihan ekonomi dalam beberapa tahun mendatang diprediksi tidak akan mampu menggerakkan permintaan semen secara signifikan sehingga utilisasi produksi pabrik semen kita masih sangat akan sangat terbatas begitu. Maka dengan fakta-fakta tersebut Pak Menteri, atas nama rakyat Indonesia, kami mohon hentikan sementara izin pabrik semen baru ini Pak Menteri di seluruh wilayah tanpa terkecuali kecuali di mana pun Pak Menteri.

Mungkin dikit dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak Menteri. Sehat dan sukses selalu Pak Menteri, inspirasi saya.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, itu Pak Menteri tidak menyakut anggaran, itu aspirasi.

F-PG (NUSRON WAHID):

Itu karena Bosowa (*suara tidak jelas*) enggak dukung (*suara tidak jelas*) makanya ga dikasih izin.

KETUA RAPAT:

Yang di Banyuwangi itu ya?

Ok, selanjutnya saya minta untuk lebih dipersingkat karena kita waktu kita sudah habis sebenarnya ini, fokus pada anggaran.

Silakan, Pak Ananta.

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Ya

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Om Swastiastu.***

**Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota Komisi VI, dan
Pak Menteri dengan jajarannya,**

Saya akan sangat singkat saja sesuai dengan anjuran.

Pertama, saya ingin mewakili Banten 3 dapil kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kementerian Investasi dan Kepala BKPM karena umurnya baru investasi, Menteri Investasi kan umurnya baru seumur jagung tapi gasnya sudah mentok sehingga target-targetnya tercapai. Tetapi saya berharap meskipun juga mendukung adanya penambahan anggaran tapi kalau sampai Menteri Sri Mulyani belum bisa bernyanyi bersama Pak Menteri dan juga belum belum bisa senyum, saya mohon potongan-potongan anggaran ini tidak membuat kemudian capaian kerjanya itu tidak memenuhi target.

Kemudian pertanyaan saya ini berawal dari ketidaktahuan. Kalau kita berdasarkan informasi yang saya dengarkan data bahwa apa Kementerian Investasi/BKPM ini saat ini hanya menangani 20% total dari investasi yang masuk ke Republik ini. Meskipun tadi juga disinggung tapi saya ingin sampaikan data *detail*-nya, 80% itu sebetulnya ditangani oleh ditangani oleh kementerian apa? Kemudian itu dikelola oleh siapa dan ke mana? Itu perlu mendapatkan penjelasan sehingga tambahan kalau kita bicara tentang anggaran dan sebagainya bisa akan mendapatkan potret karena informasi yang kami peroleh hanya 20%. Kemudian bagaimana Kementerian Investasi ini nanti bisa memaksimalkan peran ke depan dan memperluas jangkauannya, ini yang kedua.

Kemudian yang ketiga Pak, kami juga mendapatkan informasi bahwa di daerah-daerah masih banyak simpang siur soal LKPM yaitu Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang terjadi di daerah termasuk yang masuk dalam data OSS milik BKPM. Lah, ini sebetulnya sejauh mana permasalahan di lapangan. Ya, ini saya mohon secara apa namanya jujur disampaikan. Lah karena apa? masuknya modal kemudian keluarnya modal ini harus benar-benar terkendali ya harus dipantau oleh negara. Ini kaitannya dengan kemandirian.

Saya pikir itu Pak Menteri yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Perpanjang 15 menit lagi ya Pak Menteri? Perpanjang 15 menit lagi ya

(RAPAT : SETUJU)

Silakan Pak Deddy.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Baik.

**Terima kasih Pimpinan dan semua rekan-rekan anggota,
Terima kasih juga Pak Menteri dan semua jajaran.**

Saya mengapresiasi semua pencapaian yang sudah di apa namanya disampaikan tadi termasuk apa namanya realisasi anggaran hingga pertengahan tahun ini, ini sudah luar biasa. Saya takutnya bulan September Pak Bayu udah kehabisan duit nih sambil kerjanya cepat. Nah, tapi kalau kalau terkait anggaran-anggaran itu ada di hilir Pak. Jadi, kita harus mulai dari tujuan. Kenapa sih BPKM ketika ubah menjadi Kementerian Investasi? Ini harus jelas dulu karena dengan begitu baru kita bisa kemudian turun desain organisasi, lalu kita masuk ke target baru anggaran, Pak. Sekarang persoalannya kan pertanyaan saya dari tadi sudah banyak teman-teman yang bicara, apakah target yang ingin dicapai itu memang sudah sesuai dengan power yang sekarang diberikan kepada Kementerian Investasi dengan adanya *omnibus law* dan segala macam.

Nah, ini yang saya kira Pak Bhalil harus jelas-jelas bisa menyampaikan itu kepada Kementerian Keuangan, kementerian terkait, dan juga kepada Bapak Presiden harus berani menyatakan, Pak bahwa nanti tahun 2021 kami harus mendapatkan target investasi sekian, untuk itu perlu biaya sekian. Tanpa itu saya kira jadi tidak *legitimate* dan sekarang untuk tahun anggaran 2022 ini saya lihat nanti juga belum tentu kita bisa mendapatkan maksimal.

Karena terus terang dengan anggaran seperti itu dengan logika organisasi seperti itu dalam *road map* yang juga belum jelas, kita juga akan kesulitan mengklaim bahwa perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi memang mampu me-*refresh* sedemikian rupa. Itu yang ingin saya sampaikan Pak. Jadi, tolong kalau kita nanti menambahkan, memperjuangkan pertambahan anggaran tentu dengan *roadmap* yang jelas, dengan target yang *clear* begitu jadi tidak menjadi masalah.

Yang kedua, saya ingin mengingatkan Pak seperti yang saya pernah sampaikan di pertemuan terdahulu bahwa seharusnya BKPM ini dengan amunisi yang dia punya harus menjadi apa namanya menjadi alat negara untuk mendistribusikan keadilan, Pak. Jadi, tidak cukup hanya kita mengatakan bahwa investasi masuk lalu tenaga kerja sekian. Tetapi dia ada juga harus yang memberikan *road map* yang *clear* tentang penerimaan negara akan bertambah berapa Pak. Industri kita akan menyerap berapa dari semua investasi itu? Bagaimana keadilan antar pulau? Bagaimana kita bisa keluar dari mengandalkan hanya komoditi? Ini semua juga termasuk tadi bagaimana dengan pengusaha domestik kita? Ini lah kita sangat berharap kepada Pak Bahlil yang luar biasa apa namanya tekun dan konkrit kalau bekerja ini supaya semua menjadi *clear* Pak tidak ada masalah kepada kita.

Yang ketiga, Pak dari data itu jelas sekali bahwa Singapura itu adalah investor terbesar tapi uangnya bukan Singapura itu Pak. Itu Pak semua *fund manager* ada di Singapura tantangan bagi Pak Bahlil ya. Kalau menurut saya berikutnya adalah bagaimana menari kantor-kantor *fund manager* itu ada Jakarta sehingga tidak setiap kali kita main IPO, segala macam itu benefitnya ada di perbankan Singapura, ada di investor Singapura. Bisa nambah nggak *fund manager* ini di Jakarta karena uang itu dari sana. Karena kalau sebagai negara mungkin yang terbanyak itu memang Cina dan Jepang. Singapura disitu hanya sebagai transit uangnya karena kantor *fund manager* nya ada di sana, kantor-kantor investasinya ada di sana. Jadi, ini perlu, Pak. Pak Bahli harus berhasil menarik kantor-kantor itu pindah ke sini sehingga diskusi dan interaksi menjadi besar apa tinggi dan kemudian investasinya menjadi besar.

Yang ke-empat Pak, saya berharap tadi teman-teman sudah menyinggung Kementerian Investasi juga harus menjadi *clearing house* Pak. Kita mendengar keributan soal tenaga kerja asing, sengkaret tenaga kerja asing, sengkaret smelter tapi Kementerian Investasi tidak pernah bersuara maka harusnya selain menjahit bagaimana supaya investasi terkait dengan RT/RW, keadilan antar wilayah, distribusi keadilan kesejahteraan tapi juga menjadi *clearing house*, Pak. Jangan pemerintah babak belur gitu ya tapi Kementerian Investasi tidak bersuara menjadi *clearing house* bagi kebijakan investasi.

Yang terakhir, saya mau mengingatkan Pak mempertanyakan ini saya minta *update* terkait dengan investasi besar yang akan dilakukan di daerah pemilihan saya di Kalimantan Utara. Kita tahu bahwa ada tentang PLTA yang terbesar kedua setelah Cina di Asia dan juga *Green Industrial Park*. Saya sudah sering berdiskusi dengan Pak Bahlil soal ini tapi saya kira ini perlu juga bertanggung jawab kepada DPR sehingga benar-benar kita mendapat informasi. Apalagi saya sebagai Anggota DPR, perwakilan Kalimantan Utara juga perlu kejelasan.

Yang saya tahu presiden akan ke sana bulan Oktober untuk melakukan *ground breaking*. Sementara kita tahu ada investor lain yang sudah ada di sana. Nah, ini bagaimana negara menyelesaikan ini karena kan tidak mungkin dulu pengusaha yang sudah hampir 7 tahun bekerja mencoba mengurus semua izin investasi segala macam, sebelum ada *omnibus law*

tiba-tiba dicampakkan begitu saja. Nah, saya kira saya tidak akan memihak mana pun ya tapi saya berharap ada penyelesaian solusi yang *win-win solution* karena ini juga menyangkut bagaimana persepsi dari negara lain, investor lain terhadap kepastian berusaha di kita.

Saya kira itu saja Pak Bahlil. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan segera kita bisa ngopi bareng.

Terima kasih, Pimpinan.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Deddy.
Silakan Ibu Siti Muharomah, masih ada?

F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag. M.AP.):

Ada Pak.
Terima kasih, pimpinan

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Pimpinan, Anggota Komisi VI yang kami hormati,
Bapak Menteri Investasi, Pak Bahlil, dan
Juga para staf jajaran khususnya Pak Eka Sastra,

Pertama, tentu secara singkat kita mengapresiasi serapan dan pencapaiannya atas kinerja Pak Bahlil dan juga para bapak dan ibu di Kementerian Investasi. Dan kemudian yang kedua, kita turut prihatin dengan minimalnya anggaran. Mudah-mudahan meskipun minimal tidak akan menyurutkan apa namanya kinerja kedepan lebih baik dan tetap semangat.

Bapak, beberapa hal mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu sesingkat mungkin yang ingin kami sampaikan :

1. Kami meminta Pak Bahlil, mungkin bisa mohon dipaparkan terkait peta peluang investasi. Itu investasi di bidang apa saja yang memang betul-betul strategis yang memang kita bisa *explore* bersama-sama di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya juga di bidang apa di bidang tersebut bagaimana dengan prosentase, prosentasi untuk PMA dan juga PMDN dari peluang-peluang tersebut. Pertama itu;
2. Tadi disampaikan tentang Satgas Percepatan Investasi. Itu sudah disampaikan beberapa unsur didalamnya dalam satgas itu. Namun, kalau boleh kami minta untuk dipaparkan tugas pokok dan fungsi dari satgas tersebut karena saya pikir Kementerian

Investasi ini kan baru dan masih banyak penguatan-penguatan sistem yang tentunya sistem internal harus dioptimalkan untuk menambah apa namanya kekuatan yang ada di dalam kementerian ini. Dan kalau kemudian dengan adanya satgas ini kemudian berartikan menambah sebuah urusan baru dengan adanya satgas yang tentunya ini menjadi apa ya namanya kerjaan yang lebih maksimal lagi. Kami sangat berharap justru jangan sampai dengan adanya satgas ini bisa menjadi hal yang kontra produktif bagi kerja-kerja yang ada dimana penataan internal Kementerian Investasi juga harus dioptimalkan;

3. Pak Menteri dan Pimpinan beserta Bapak, Ibu sekalian tentang perizinan kan di apa namanya di BKPM ini kan seharusnya sudah selesai ya tapi kami masih melihat bahwa masih melibatkan lembaga-lembaga lain. Padahal kalau sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah kita produksi bersama-sama, kita hasilkan bersama ini kan hanya butuh adanya izin usaha, izin edar, dan juga sertifikasi halal. Jadi, kita berharap bahwa orang akan investasi itu justru dengan birokrasi ini kita lebih dipermudah bukan malah dipersulit karena apa birokrasi perizinan yang mungkin masih ada beberapa hal yang perlu segera diperbaiki.

Kami mohon Pak Menteri untuk bagaimana ini bisa menjadi sebuah apa perbaikan-perbaikan dan tentunya menyesuaikan dengan undang-undang yang kita apa namanya hasilkan bersama Undang-Undang Cipta Kerja ini agar mempermudah seluruh masyarakat yang akan investasi baik masyarakat kita dari Indonesia maupun dari asing tentu harus sesuai dengan yang kita harapkan.

Saya pikir itu Pimpinan singkat, mudah-mudahan tidak terlalu panjang waktu.

*Akhirul kalam wallahul Muwafiq Illa aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Andre, masih perlu bicara?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Bentar ada satu lagi

KETUA RAPAT:

Kira-kira itu Pak

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ada satu lagi, Mufti lupa.
Baik.

Terima kasih.

Pimpinan yang ganteng, gagah, perkasa, Pak Demer orang paling ganteng di Komisi VI, Pak Menteri yang saya hormati,

Pertama tentu kita apresiasi dulu dong Pak Menteri Kementerian Investasi BKPM meraih opini wajar tanpa pengecualian. Itu luar biasa prestasi Pak Bahlil, itu satu.

Yang kedua, Pak Bahlil tadi melengkapi Mufti, tadi kita sudah dengar ya dan kita sudah berulang-ulang kali bicara di sini waktu itu terakhir bahkan Pak Bahlil, Menteri Investasi, Pak Menteri Menperin ini yang jarang hadir di Komisi VI akhirnya pindah ke komisi VII itu, Pak Andika juga janji di sini bahwa apa namanya tidak ada lagi investasi semen tapi ternyata kan masih ada Pak, itu satu ya. Ini tolong dibereskan sama Bapak. Yang paling *concern* itu sekarang saya, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Pimpinan, mohon maaf boleh nggak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Boleh-boleh.
Silakan Pak Bahlil

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Izin, Pimpinan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Iya nggak apa-apa.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Saya izin Pak Andre.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Iya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Menyangkut semen, saya kok jadi bingung ya kelihatannya Pak Andre lebih tahu izin semen daripada saya kelihatannya ini. Pak Andre, saya ingin menyampaikan kepada Pak Mufti juga moratorium semen itu udah diputuskan dari atas.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Iya, betul

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Dan nggak pernah lagi satu semen izin semen yang di Kalimantan Timur itu untuk basis ekspor 82% sampai 90% karena kontraknya sudah dilakukan sebelumnya, selebihnya nggak ada. Dan izin yang diperbolehkan itu hanya di Papua, kenapa di Papua? Karena antara *supply-demand* belum berimbang. Pabrik di Manokwari itu hanya meng-cover 1,5 juta *output*-nya sementara di Papua sekarang jadi 1,8, 1,9 juta jadi lebihnya nggak ada. Jadi, saya mohon juga mohon maaf Pimpinan ini jangan menjadi bola liar.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nggak gini Pak Menteri, boleh dijawab, ditanggapin dulu.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Saya biar lebih jelas, Pak Andre.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jadi begini, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Seolah-olah bahwa kami di Kementerian Investasi mengeluarkan izin lain. Tolong sampaikan izin mana itu ?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nah, boleh kita tanggapin.

Pak Menteri beralasan saya tidak mau menanggapi Papua karena memang Papua membutuhkan ya. Kita coret nih Papua, Pak dari pembahasan kita. Saya ingin menyampaikan Pak Menteri bagaimana cara pemerintah mengontrol bahwa semen yang diproduksi di Kutai Timur itu kan bisa diekspor semuanya Pak Menteri. Karena mohon maaf Pak Menteri dengan segala hormat, pemerintah kita itu lemah untuk mengawasi berbagai hal. Tadi Mufti sudah bilang soal tenaga kerja saja, kita lemah mengawasi apalagi soal ekspor nanti, tiba-tiba dia ngakunya ekspor ternyata nggak. Nah, ini ini yang perlu Pak Menteri. Jadi kita mengkritik pemerintah ini dalam rangka mendukung pemerintah, itu yang perlu digarisbawahi Pak Menteri.

Kita ini sekarang partai pendukung Pemerintah Pak Menteri ya, itu Pak Menteri pahami dulu ya. Ya, akhirnya menyebabkan pemerintah nih digebukin kanan kiri, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Mohon maaf Pak Andre

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nah, itu yang perlu dipastikan. Jadi, begini kan Mufti, Andre Rosiade dan seluruh Anggota Komisi VI didatangi sama Serikat Pekerja Semen, lalu didatangi banyak pihak lalu mereka menyuarakan kepada kita.

KETUA RAPAT:

Ok

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nah, itu kita menyampaikan karena kita sayang Pak Menteri supaya pemerintah itu punya garis yang jelas bagaimana mengawal hal ini supaya nanti jangan sampai dibangun, bentar Om Demer ini penting ini.

KETUA RAPAT:

Ok, mungkin begini.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Itu satu.

KETUA RAPAT:

mungkin begini.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Itu satu.

Yang kedua, Pak Menteri itu semen. Nanti Pak Menteri silakan jawab carilah caranya pemerintah benar-benar bisa mengawasi ya.

KETUA RAPAT:

Ok.

Dapat di pahami, itu dapat di pahami.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Itu satu.

Yang kedua Pak Menteri tersayang ya, kita cinta loh Pak Menteri. Yang kedua, Pak Menteri di dalam ruangan ini minggu lalu itu Bang Lutfi 2 (dua) kali rapat sama saya sudah saya ingetin soal nikel ya. *Alhamdulillah* hari Jumat kemarin Kementerian Perdagangan sudah mengundang teman-teman

Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia yang memang setelah perjuangan Pak Menteri dengan Kementerian Perdagangan sekarang harga patokan mineral kan sudah dipergunakan ya. Tapi kan permasalahannya ini yang perlu kita garis bawahi bahwa setelah disurvei sama Sucofindo dan Surveyor Indonesia misalnya kandungan ori 1,8, tiba-tiba di smelter barang kawan itu jadi 1,5 Pak Menteri. Dan semua pengusaha berteriak, mungkin teman-teman Pak Menteri juga ada yang berteriak, gitu.

Nah, ini kami sudah sampaikan ke Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan akan memanggil ya para Asosiasi Surveyor itu, Sucofindo, Surveyor Indonesia, dan berbagai survei itu nah kenapa ini terjadi. Nah, kalau di Sucofindo dan Surveyor Indonesia 1,8 kok tiba-tiba dia Anindia jadi 1,5. Saya tanya langsung kebutuhan Sucofindo dan Surveyor Indonesia kan mitra komisi VI. Saya tanya sama dirut-dirutnya, Pak Dirut apa mungkin dari 1,87 bisa berubah 1,5? Mas Andre ini mineral, mineral itu kalau turun dari 1,87 paling jauh 1,86, paling jauh 1,85 nggak mungkin jadi 1,6 atau 1,5.

Nah, ini yang kira-kira yang merugikan temen-temen pengusaha nasional kita, Pak Bahlil, mereka sudah *leasing*, hutang di bank, segalanya tiba-tiba nanti sampai di smelter Tiongkok itu Pak Bahlil, "*loe mau ngambil kalau nggak mau 1,5 udah loe angkat lagi*". Nah, saya mau ingin memberikan solusi kepada Pak Bahlil, ini kan bentuk kedzoliman. Nah, saya usulkan ke Pak Bahlil, kita *win win* aja. Kalau dianggap sampah sama *smelter-smelter* Tiongkok itu, yang sampah itu kita ekspor saja, kan di nggak mau makan. Ekspor, jual misalnya dengan 40 dollar, bayar pajak 15%. Jadi, pengusaha kita nggak rugi, negara juga nggak rugi ya, itu saya sudah usulkan ke Menteri Perdagangan.

Saya harapkan Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi memikirkan ini dan membahas ini dalam ratas. Jangan sampai kita punya ini untuk *bargain* Pak Bahlil sama smelter-smelter Tiongkok itu. Jangan sampai smelter Tiongkok itu yang mengatur kita ini, sumber daya alam kita.

KETUA RAPAT:

Ok.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Harus dirasakan dan dirasakan dan dinikmati oleh Rakyat Indonesia. Itu aja Pak Bahlil dan saya percaya Pak Bahlil NKRI-lah. Tolong Pak Bahlil cari solusinya.

Terima kasih Pak Bahlil.
Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ok.
Subtansinya dapat dimengerti oleh Pak Bahlil, ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Pimpinan, saya izin waktu biar tidak bias, supaya media juga tulisnya yang benar.

Sekali lagi Pak Andre urusan semen nanti dicatat dalam kesimpulan rapat ini, saya terganggu betul. Nanti Pak Imam Deputy Dalaks, kita melakukan audit produksi dari seluruh seluruh semen baru kemudian kita bandingkan antara total kapasitas produksi dan realisasi dan permintaan. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini tapi tolong juga jangan saya dianggap main-main dengan urusan ini, Pak Andre. Saya sejak mahasiswa nggak pernah main-main dan ini saya akan usut betul Pak Andre, tetapi kalau.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kita dukung Pak Bahlil

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Tetapi kalau seandainya kapasitas terpasang akan lebih besar daripada kapasitas produksi dan kemudian permintaan semen naik maka kami akan membuat kebijakan baru, saya nggak pusing dengan yang lainnya. Saya ngerti cara main ini, kita ini pedagang Pak, kita tahu nih cara main begini. Kalau kita sudah mengakomodir aspirasi, pertama Pak Andre yang mengusulkan untuk pembatasan moratorium semen waktu itu kan masih Kepala BKPM dan saya usulkan di ratas. Dan tidak mungkin saya mau menjilat lidah saya untuk mengambil itu. Biar Pak Andre tahu, aku kalau kementerian lain boleh Pak Andre ini tapi kalau untuk saya urusan begini Pak Andre tidak perlu meragukan reputasi saya.

Jadi, Pak Imam nanti dimasukkan dalam kesimpulan ini. Kami akan datang mempresentasikan khusus terhadap kapasitas produksi dan realisasi produksi dikaitkan dengan permintaan negara. Jadi, kalau realisasi produksinya katakanlah 6 juta contoh, permintaannya sudah mencapai 7 juta impor tidak menutup kemungkinan untuk kita pertimbangkan dibuka, eh apa pembuatan pabrik baru, itu satu.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ya, nggak apa-apa Bapak Bahlil silakan audit itu dan kami meyakini ya kapasitas produksi kita 120 juta ya hanya permintaan kita 60 juta itu faktanya terserah nanti kita adu saja.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Kita adu.

KETUA RAPAT:

Ok, ok nanti itu diaudit ok

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nggak apa-apa, bagus itu dibuka.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Yang kedua, izin Pimpinan menyangkut dengan nikel. Saya setuju Pak, saya ini mantan pengusaha nikel, Pak Andre. Waktu proses untuk bagaimana menghentikan ekspor nikel, 4 (empat) hari saya masuk menjadi Kepala BKPM dan akan mengusulkan untuk ekspor nikel dan kemudian terjadinya. Harapan kita adalah agar terjadinya hilirisasi tetapi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang melakukan nikel ini dibeli dengan harga yang pantas.

Itulah kemudian muncul HPM bahwa dalam permainan ini, Pak Andre kan tahu kelakuan-kelakuan ini barang tetapi kalau memang itu yang menjadi perhatian, itu sudah ada satgas khusus untuk pengawalan terhadap harga HPM. Nanti coba saya akan bicarakan Pak Andre dengan teman-teman satgas untuk meng-*clear*-kan ini. Tapi yakin lah bahwa sampai kapan pun idialisme kita untuk bagaimana mendukung teman-teman dalam negeri, itu sesuatu yang sangat prioritas.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jadi, Pak Pimpinan, kita tidak meragukan idialisme Pak Bhalil. Kita memberikan solusi, masukan ke Pak Bhalil bagaimana teman-teman yang didzolimi ini dianggap sampah itu yang diekspor supaya kita punya *bargain* kepada smelter Tiongkok itu. Jadi, kalau soal idialisme Pak Bhalil nggak usah kita ragukan kita kenallah Saudara Pak Bhalil Lahadalia, ya nggak mungkin bisa menjadi mungkin sama dia, gitu loh.

ANGGOTA :

Ekspor sampah dong.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jadi, kita ekspor sampah or gitu loh, kan dianggap smelter Tiongkok ini barangnya sampah "*loe angkat atau gua beli dengan berapa harga yang gua mau*", ini penting loh Pak supaya rakyat tahu smelter Tiongkok itu memperlakukan ini barang sampah:" *loe angkat atau gua beli semau gue*".

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Saya pikir.

KETUA RAPAT:

Ok, substansi.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Itu loh barangnya, itu publik harus tahu. Jadi, jangan sampai sumber daya alam kita dikuasai oleh mereka, gitu loh, Pak.

Thank you, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Masuk lagi detik barang itu.

KETUA RAPAT:

Jadi, substansinya sudah didapatkan Pak Menteri. Substansi itu program pengawasan itu Pak Menteri. Jadi, nanti substansinya sudah didapat Pak Menteri mungkin nanti akan dicek baik itu audit, audit semen maupun nikel itu akan diaudit nanti.

Kita lanjutkan ke meja Pimpinan, ada Pak Martin, ada Pak Bimo juga. Pak Bimo, silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA / WAKIL KETUA):

Cukup Pak Demer, saya mendengarkan

KETUA RAPAT:

Dengar-dengar.

F-PDIP (ARIA BIMA / WAKIL KETUA):

Mendengarkan saja, saya cukup.

KETUA RAPAT:

Ok.

F-PDIP (ARIA BIMA / WAKIL KETUA):

Makasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Bimo.

Pak Martin ada yang mau disampaikan ga? Cukup ya? Kalau sudah cukup mungkin Pak, Pak Menteri tolong dijawab secara, terutamanya masalah anggaran Pak karena ini kita jangan sampai nanti menjawab yang

lain-lain malah kita menjawab anggarannya belum selesai. Karena kesimpulan kita hari ini adalah kesimpulan anggaran. Kita tidak bisa menyimpulkan pengawasan.

Silakan, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati dan kami muliakan,

Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas tanggapan dari Bapak, Ibu semua terkait dengan materi agenda rapat kita pada hari ini yang mohon maaf saya akan berikan tanggapan secara umum aja, *detail*-nya kami seizin Pimpinan dan Bapak, Ibu semua kami akan melakukan secara tertulis :

1. Menyangkut dengan anggaran kami akan *detail*-kan tentang 600 miliar tersebut tapi izin Pimpinan sebelum kami kembalikan kepada Pimpinan, saya ada beberapa yang harus saya ulas terkait dengan investasi yang berkualitas. Jadi, investasi yang berkualitas dalam pandangan kami adalah tujuan investasi itu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, itu dulu substansinya. Adil itu dulu substansinya adil itu. Pak Presiden selalu selalu membicarakan membangun Indonesia, itu Indonesia sentris dari Aceh sampai Papua. Harus diakui Pimpinan bahwa sebelum kami masuk di pemerintahan, perimbangan investasi antara Jawa dan luar Jawa itu di Jawa lebih besar. Mohon maaf tanpa bermaksud mengatakan sukuisme tetapi kita membangun bangsa ini kan dari Sabang sampai Merauke maka kita langsung mendorong bagaimana agar terjadi perimbangan, itulah kita lakukan pertama;
2. Investasi yang berproses seperti apa lagi antara *foreign direct investment* dengan PMDN kita itu juga harus berimbang, syukur-syukur kalau itu bisa terjadi peningkatan *foreign direct investment* yang mengarah kepada investasi yang tidak hanya konsumtif tapi dia bisa menguntungkan kepada hilirisasi;
3. Adalah investasi yang masuk itu selama ini mohon maaf saya harus mengatakan saya pernah berproses di daerah, orang daerah itu hanya menjadi sebagian dulunya itu, mohon maaf penonton, saya tidak pingin begitu ketika kami masuk di pemerintah. Kami pingin ada keadilan, setiap investasi yang masuk harus menjadikan pengusaha daerah dan UMKM daerah sebagai subjek dan objek pembangunan ekonomi. Karena itu, kebijakan kita adalah setiap investasi masuk harus berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM.

Dan yang ketiga alat investasi yang mendorong pada terciptanya nilai tambah yaitu hilirisasi dan industri. Ini adalah bagian yang menjadi satu referensi pemahaman bahwa yang dimaksud dengan investasi berkualitas sudah barang tentu lingkungan sekitar kita perhatikan.

Yang kedua, Bapak Ibu semua. Saya juga terima kasih atas pendapat bahwa beban kerja semakin tinggi tetapi anggaran menurun. Mungkin saya sejak lahir memang enggak pernah bersungut hidupnya karena selalu berjuang. Bahkan dalam perjuangan itu kapan terwujud yang penting yakin dulu yakin usaha sampaikan gitu. Kapan pun kapan pun terwujudnya yang penting yakin dulu karena dengan keyakinan itu akan mendorong. Saya kebetulan terbiasa dalam sebuah proses pembelajaran saya dari kampung sampai Jakarta dengan selalu melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak rasional.

Tapi karena berkat Tuhan, berkat dorongan dari teman-teman itu In Syaa Allah bisa. Saya mengajukan tambahan 600 miliar itu pun kalau disetujui. Tapi, kalau tidak demi negara, rakyat, bangsa, negara, kita akan melakukan semaksimal mungkin apa ya kita punya. Iya, kalau dulu ajaran Pak Nusron bagaimana menggolkan kegiatan buat proposal. Proposal itu cuman dikasih kertas kop sama cap. Isi daripada surat proposal dibuat di Jalan Pramuka. Kalau kali ini isinya ada lambangnya Garuda, masa enggak bisa akal kita untuk kita lakukan.

Menyangkut dengan persoalan lagu tentang Ibu Menteri Keuangan, saya yakin Ibu Menteri Keuangan masih seperti yang dulu. Ibu Menteri Keuangan tahu betul apa yang dilakukan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, teman-teman semua, Bapak, Ibu semua yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa saya setuju bahwa konsumsi itu terjadi 57% PDB kita di kuartal kedua itu kontribusinya konsumsi.

Tapi konsumsi itu bicara tentang daya beli masyarakat dan daya beli masyarakat waktu lahir apabila ada kepastian pendapatan dan ujung dari para kepastian pendapatan itu adalah lapangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan itu tidak akan mungkin diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah mengurus lewat penerimaan PNS. Karena, penerimaan PNS BUMN, Tentara dan Polisi tidak lebih dari 1 juta per tahun. Hari ini di lapangan pekerjaan kita itu 7 juta eksisting, 2,9 juta angka kerja per tahun. Dan ketika Covid terjadi PHK mohon maaf sekitar 5 sampai 6 juta.

Jadi, memang investasi ini adalah hulu untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Dan tidak hanya hulu tapi juga tidak hanya hulu untuk menciptakan lapangan pekerjaan tetapi juga hulu untuk mendapatkan sumber pendapatan negara karena total pendapatan negara kita 76% itu pajak dan pajak yang paling besar itu adalah pajak badan. Ini teori ekonomi dari Pak Nusron Wahid ketika dulu memberikan *training* kepada kami.

Nah, oleh karena, itu saya pikir tidak ada alasan untuk kemudian tidak kita mendorong sektor investasi. Betul investasi ini bayi yang baru namun percayalah bahwa kalau abang-abang eh sorry Bapak-bapak semua ini kita seperti di organisasi pakai abang-abang, mohon maaf, Pimpinan saya cabut kata-kata abang-abang saya, Bapak-bapak, Ibu yang terhormat dan dimuliakan ini, kalau bisa kita bisa kita kolaborasi bersama In Syaa Allah, kita akan jalani.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Ketua, Pak Ketua, kok penjelasannya mirip kayak penjelasannya Profesor Erani Yustika ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Menyangkut dengan Pimpinan, saya ingin mengatakan menyangkut dengan Ibu Evita dan Pak Marwan Jawa, Pak Marwan Jafar, EODB. Pimpinan bukan berarti kita tidak mengupayakan untuk terjadi peningkatan ranking EODB. sejak tahun 2019 akhir Pimpinan, 2020 dan selalu Bank Dunia belum mengeluarkan penilaian terhadap EODB. Jadi, ini bukan kesalahan Pemerintah Republik Indonesia. Kami kemarin ke Amerika ketemu di *World Bank*, kami sudah menanyakan itu. Dan In Syaa Allah di Oktober ini baru turun. In Syaa Allah, EODB kita akan terjadi perbaikan peringkat ke arah yang lebih baik seiring dengan implementasinya Undang-Undang Cipta Kerja.

Ibu Evita yang saya hormati,

Saya juga sangat apresiasi tentang UMKM. Bu, sekarang UMKM itu kalau investasi asing yang di bawah 10 miliar berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 90, tidak boleh asing masuk bahkan di situ ditegaskan setiap investasi masuk wajib pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi UMKM. Itu wajib itu nggak boleh nggak. Di sinilah bentuk afirmatif negara, kehadiran negara untuk membentengi teman-teman pelaku pengusaha yang UMKM dan kolaborasi sudah berhak tentu.

Khusus untuk senior saya, Pak Marwan Jafar. Pandangan saya baik secara kebijakan maupun akademisi tentang bagaimana melihat lingkungan sebagai suatu investasi yang berkelanjutan. Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan ruang yang cukup untuk bagaimana mengkanalisasi agar terjadinya kesinambungan investasi yang memperhatikan lingkungan. Karena itu amdal sekarang masuk dalam bagian perizinan berusaha. Dulunya amdal itu tidak termasuk dalam perizinan perusahaan sehingga dulu kalau perusahaan tidak sesuai dengan amdal maka dia tidak bisa mencabut izinnya, dia harus lewat pengadilan.

Tapi, dengan dengan amdal masuk pada izin maka dia *automatically* ketika dia melanggar, dia bisa dicabut itu izinnya. Ini adalah bagian strategi pemerintah dalam mendorong untuk ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Sudah barang tentu dalam kajian saya, saya berpendapat bahwa kita akan masuk pada fase baru tentang green energy lingkungan ini harus kita jaga, nggak bisa lagi seperti dulu-dulu.

Saya pikir itu, Pimpinan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu per satu. Khusus untuk Pak Khaeron sebelum ini menjadi bias karena ini pernah viral di beberapa *media* “*temuan BPK terhadap kinerja BKPM terkait dengan 4.000 lebih perusahaan asing yang berpotensi bermasalah dengan angka kurang lebih sekitar 73 triliun*”. Penting Pimpinan, saya harus luruskan di

forum yang sangat mulia ini bahwa tahun 2018-2019 ketika terjadi transisi perizinan, dari manual menjadi OSS, dari Kemenko Perekonomian kepada kementerian kepada BKPM waktu itu, itu memang ada terjadi beberapa *lost* perusahaan yang nggak boleh 10 miliar ke bawah itu asing masuk. Itu memang ada beberapa masuk, Pimpinan.

Itulah yang dihitung menjadi 73 triliun. Tapi, sekali saya menyatakan bahwa bukan itu investasi bodong, nggak atau investasi fiktif, tidak. Cuma memang perusahaan-perusahaan asing tersebut yang nggak boleh 10 miliar ke bawah masuk, itu masuk karena waktu itu sistem kita yang peralihan. Tetapi seiring waktu berjalan ternyata BKPM waktu itu 2018-2019 dalam melakukan penataan, sudah melakukan penataan dan sudah melakukan perbaikan. Jadi, intinya adalah tidak ada lagi perusahaan asing yang menabrak aturan atau tidak sesuai aturan, sudah *clear* itu Pimpinan. Nah, jadi, saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Tower, Pak tower saya Pak gimana Pak. Investasi tower tadi itu 100% buat apa.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Baik.

Pimpinan yang saya hormati,

Pak Nusron ini kalau saya tidak jawab nanti datang ke kantor saya besok pagi.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Saya jawaban tertulis ya, jawaban tertulis ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Saya ingin menyampaikan tentang Keppres Nomor 10 yang berubah menjadi Keppres Nomor 11 yang asal muasalnya yang tidak perlu saya ulangi tentang narasi disampaikan oleh Nusron karena persoalan adalah bagian terbuka dan bagian tidak terbuka. Sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini menganut mazhab terbuka, bukan tertutup. Ada 6 sektor saja yang kita tutupi waktu itu nuklir, kemudian terumbu karang dan segala macam sekarang ditambah dengan alkohol, selebihnya terbuka.

Nah, terkait dengan perpres ini Pak, kalau boleh kita bicara khusus tapi mungkin Pak Nusron juga bicara sama ketum partai Bapak juga supaya ada sinkronisasi karena ini *connector*-nya komandannya di mereka. Komandannya di mereka biar *fair* juga supaya jangan pertanyaannya ini ke sini terus. Maksud saya begitu, Pimpinan. Saya akan dengan senang hati

Pimpinan, kalau pertanyaan ini akan disampaikan secara vulgar juga oleh ketua umumnya, kepada ketua umumnya. Jadi, saya dengan senang hati saya mungkin akan memfasilitasi itu bisa Pak Nusron. Persoalan bagaimana merubah, yang tidak bisa diubah itu cuma Al-Quran dan dengan Al' Quran Kitab. Undang-Undang 1945 pun kalau dimungkinkan dalam syarat berpotensi iya kan, berpontensi iya kan tetapi kalau apa lagi perpres kan begitu Pak Pak Nusron.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Undan-undang apa tuh?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Hah?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Memang ada rencana amandemen?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Kebetulan saya bukan Anggota Parlemen, Pak Andre. Saya hanya meresapi apa yang dipikirkan oleh Pak Nusron bahwa tidak ada yang tidak bisa di rebuplik ini selama memenuhi kaidah aturan dan mekanisme serta syarat-syaratnya. Yang nggak bisa itu Al-Quran dan Alkitab.

Saya pikir demikian menyangkut perpres. Kalau Bapak mau saya akan mintakan waktu Pak ke Ketua Bapak. Saya akan dengan senang hati Pak.

ANGGOTA :

Pimpinan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Saya mengerti juga isinya ke mana dan siapa motifnya, saya juga tahu Pak. Saya siap untuk fasilitasi dalam rangka keberpihakan dan yakinlah Pak Nusron bahwa saya masih seperti yang dulu seperti Pak Nusron bina kita waktu masih menjadi aktivis. In Sya Allah keberpihakan kita untuk rakyat bangsa dan negara di atas segala-galanya, tidak akan pernah bergeser.

F-P.NASDEM (MUHAMMAD RAPSEL ALI) :

Pimpinan, sebentar saja, saya sedikit aja. Saya langsung aja ke Pak Menteri. Sesuai kewenangannya yang besar, saya harap setiap akhir tahun ada pengumuman ke khalayak masyarakat bahwa ini loh daftar investasi negatif tahun-tahun ini atau daftar investor yang nakal yang di-*blacklist* oleh Kementerian Investasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ok jadi gitu Pak ya

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Baik.

KETUA RAPAT:

Nanti dijawab yang lain-lain dijawab tertulis Pak ya karena kita sudah waktunya ini kita untuk membacakan draft kesimpulan, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Siap

KETUA RAPAT:

Ada yang kurang-kurang nanti teman-teman yang belum terjawab nanti tentu akan dijawab secara tertulis oleh Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Siap.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, *progress* realisasi anggaran tahun 2021, pembahasan RKA/KL Tahun Anggaran 2022, Senin 30 Agustus 2021:

1. Komisi VI DPRRI mengapresiasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 13 tahun berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020.

Nomor 1 normatif, setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

1. Komisi VI DPRRI mendorong Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2021 per 27 Agustus 2021 baru mencapai sebesar Rp374.504.097.307,-.

Normatif juga ini ya? Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VI DPRRI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S-634/MK.02/2021 dan Nomor: 516/m.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar RP711.513.546.000,- yang dialokasikan dalam 2 (dua) program antara lain :
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar RP300.901.232.000,-. Angkanya tolong Pak nanti dicek benar nggak tuh, cocokan kalau salah diinterupsi saja biar ini angkanya;
 - b. Program Penanaman Modal sebesar Rp410.612.314.000,-. Benar ya Pak ya angkanya ya? Setuju Pak Menteri ya?

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi VI DPRRI menyetujui pengajuan penanaman Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun, ini dan apa strip sih? Kepalanya itu? Kepala BKPM dan atau strip ini biar ga salah kita ngomongnya ini. Strip ya? Garis miring ya? Garing ya? Garing Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor : 1018/A.1/2021 tanggal 7 Mei 2021 kepada Menteri Keuangan Sebesar Rp600.000.000.000,- yang akan digunakan sebagai berikut :
 - a. Peta Peluang investasi dengan usulan anggaran Rp95.000.000.000,-;
 - b. Relokasi perusahaan asing ke Indonesia dengan usulan anggaran Rp140.000.000.000,-;
 - c. Eksekusi realisasi investasi bagi perusahaan penerima fasilitas penanaman modal dengan usulan anggaran sebesar RP110.000.000.000,-;
 - d. Eksekusi realisasi investasi mangkrak dengan usulan anggaran Rp120.000.000.000,-;
 - e. Peningkatan investasi baru dengan usulan anggaran RP85.000.000.000,-;
 - f. Satgas Percepatan Investasi dengan usulan anggaran Rp50.000.000.000,-.

Pak Sesmen, angkanya sudah benar?

(RAPAT : SETUJU)

4. Komisi VI DPRRI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPRRI.

setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Ini ada permintaan catatan rapat ini

Catatan Rapat:

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melakukan audit kapasitas produksi pabrik-pabrik semen dibandingkan dengan realisasi produksi dan dikaitkan dengan permintaan pasar.

Iya Pak ya? Setuju ya catatannya? Audit kapasitasnya ya audit internal. Jadi, sudah kami masukkan ke catatan Pak Andre. Pak Andre udah setuju Pak Andre ya saya masukkan catatan ya?

Selanjutnya, Bapak, Ibu-Bapak, Ibu, kita, Pak Andre kita selesaikan dulu ya udah gitu kita ngobrol lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Investasi/Kepala BKPM yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang telah disampaikan oleh Komisi VI DPRRI pada hari ini. Ada kata akhir dari Pak Menteri? Silakan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Yang saya hormati Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan Komisi VI DPRRI,

Pertama, Pimpinan kami ucapkan banyak terima kasih. Yang kedua kami juga akan menyalurkan apa yang telah menjadi arahan tadi untuk bisa kita selesaikan. Dan yang ketiga adalah kami mohon nanti bantuan Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Komisi VI untuk melakukan sosialisasi bersama Pimpinan, karena ini tugas berat sekali. Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja ini Pimpinan begitu Covid ini bisa meredah sedikit, kita langsung turun Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siap

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Karena bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman yang sangat fundamental kepada rakyat bangsa dan negara, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siap

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Dan yang terakhir Pimpinan, saya ucapkan terima kasih banyak apa yang disampaikan oleh Pak Andre dan Pak Nusron tapi terakhir Pak Nusronnya agak sedikit garuk-garuk kepala Pimpinan tentang materi saya tapi cukup aja saya tahu, Pimpinan.

Saya pikir itu, Pimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak, Ibu semua.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Syalom,
Om Santi Santi Om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pimpinan, ITPC dong, kapan kita janji kunjungan kerja ITPC. Pak Menteri, HP *number*-nya berubah nggak? Tetap ya?

KETUA RAPAT:

iya

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Pimpinan, nggak pernah berubah satu pun.

KETUA RAPAT:

Iya, nanti mungkin teman-teman kita selesaikan dulu rapat ini. Masih ada kesempatan juga sebelum Bapak Menteri nanti meninggalkan tempat, kita bisa foto bersama dengan Pak Menteri kali ini.

Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri yang dan rekan-rekan menghadiri rapat hari ini dan juga saya menekan teman-teman Panitia Anggaran untuk memperjuangkan di Badan Anggaran apa-apa yang menjadi keputusan hari ini yaitu penambahan sebesar 600 miliar ya, 600 miliar. Kami harap Panitia Anggaran memperjuangkannya di Badan Anggaran karena alasan bahwa BKPM sudah dijadikan Kementerian Investasi tentu ini lebih banyak harusnya memerlukan anggaran. Untuk itu teman-teman di Banggar untuk bekerja dengan sebaik-baiknya memperjuangkan aspirasi peningkatan 600 miliar dari Kementerian Investasi/BKPM ini.

Demikianlah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Anggota Komisi VI yang dengan setia dan sangat kritis tentu untuk tentu untuk kemajuan bersama dan penuh perhatian. Begitu juga saya ucapkan terima kasih Pak Menteri yang sangat mengerti apa-apa yang menjadi pembicaraan

rapat pada hari ini maka dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* dan *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, Om Santi Santi, saya tutup rapat ini.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.25 WIB)

JAKARTA, 30 AGUSTUS 2021
a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si
NIP.197104071992032001